



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



RENCANA STRATEGIS

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2016 - 2020**

LPPM UB 2016



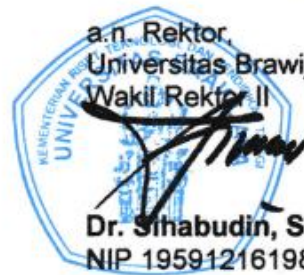
LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ✓
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
TAHUN 2016 – 2020

1. Nama Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
2. Alamat Perguruan Tinggi : Jalan Veteran Malang 65145
3. Telepon : 0341 – 551611, Pesawat : 100, 101, 102, 103
4. Fax : 0341 – 575811
5. E-mail : rektorat@ub.ac.id
6. Nama Rektor : Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS

Malang, 27 Oktober 2016

a.n. Rektor,
Universitas Brawijaya,
Wakil Rektor II



Dr. Sinabudin, SH., MH.
NIP 195912161985031001



KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya tahun 2016-2020 telah diselesaikan. Buku Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan pengabdian dan pengembangan pengetahuan, inovasi dan teknologi Universitas Brawijaya untuk tahun 2016-2020.

Semoga Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat ini mampu menjadi kompas dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat untuk memperoleh produk unggulan Universitas Brawijaya yang mampu bersaing pada taraf global. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dilingkungan Universitas Brawijaya atas segala kontribusinya dalam menyusun Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya.

Malang, Oktober 2016

Penyusun

I PENDAHULUAN

I. SEJARAH LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA (LPPM-UB)

Sebagaimana diketahui bahwa sebelum berdirinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM-UB) yang sekarang, telah diawali oleh berdirinya Lembaga Penelitian (LEMLIT) dan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya yang ketika itu sifatnya berdiri sendiri. Dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi kerja, maka pada tanggal 13 Mei 2008 dilakukan penggabungan kedua lembaga tersebut melalui SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 122A/SK/2008 tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (LEMLIT) dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM). Berikut ilustrasi sejarah LPPM-UB:

I.1 Sejarah Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya (LEMLIT-UNBRA) berdiri sejak Tahun 1978 sampai dengan 2008

Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya adalah salah satu Lembaga yang ada di Universitas Brawijaya sejak tahun 1978 sesuai SK Rektor Universitas Brawijaya No. 018/SKEP/1978 tanggal 8 Februari 1978 dan Ir. Baskoro Winarno (Pembantu Rektor Bidang Akademis) sebagai Pjs. Direktur Lembaga Penelitian dan Herman Soesangobeng, SH sebagai Sekretaris.

Pada tahun 1979 Rektor Universitas Brawijaya menerbitkan SK No. 003/SKEP/1979 Tanggal 15 Januari 1979 tentang penyempurnaan organisasi dan personalia Pusat Studi Pengembangan Masyarakat Desa Unibraw, SK ini diterbitkan karena semakin meningkatnya pekerjaan Pusat Studi Pengembangan Masyarakat Desa Unibraw, sehingga perlu penyempurnaan Struktur Organisasi, untuk melengkapi personalianya yang ada di SK Rektor No. 018/SKEP/1978, Ketua Pusat Studi Pengembangan Masyarakat Desa Unibraw adalah Ir. Iman Sutrisno dan Sekretaris/Bendahara A. Mukti Arsyad, SH.

Pada tanggal 15 Mei 1979, Herman Soesangobeng, SH, diangkat sebagai Ketua berdasarkan SK Rektor No. 020/SKEP/1979. Hal ini dilakukan untuk kelancaran



administrasi karena selama ini jabatan Ketua dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademis (PR I)

Lembaga penelitian tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap persoalan lingkungan hidup yang merupakan persoalan nasional, dengan SK Rektor No. 069A/SKEP/1979 tanggal 20 Oktober 1979 membentuk Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) dengan Ketua A. Masyhur Effendi, SH., Agus Djamhuri sebagai Wakil Ketua, Herman Soesang Obeng, SH sebagai Sekretaris.

Pada tahun 1980, susunan organisasi dan personalia PSLH mengalami perubahan dengan SK Rektor No. 019/SKEP/1980 tanggal 7 April 1980 mengangkat Ir. Imam Soetrisno sebagai Ketua, Ir. Suntoyo M. Agr sebagai Wakil Ketua, Ir. Timotius Hartono, MPA sebagai Sekretaris. PSLH dibagi menjadi 2 (dua) bidang yaitu bidang pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan diKetuai oleh Ir. Abdul Azis Husein dan bidang pengelolaan pemukiman dan Sosial Budaya diketuai oleh Abdul Moekti Arsyad, SH.

Dengan terbitnya PP No. 5 Tahun 1980 tentang pokok-pokok Organisasi/Institut Negeri, Rektor perlu menyempurnakan struktur organisasi Unibraw. Dan pada tanggal 7 November 1981 Rektor, berdasarkan SK Rektor No. 075/SK/1981, mengangkat Drs. Taher Alhabsyi sebagai Ketua, Mukti Arsyad, SH sebagai Sekretaris pada lembaga penelitian yang membawahi 4 (empat) pusat penelitian :

- a. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam, Kepala Puslitnya adalah Ir. Iman Soetrisno;
- b. Pusat Penelitian Ubi-ubian, Kepala Puslitnya Prof.Dr.H. Soetono M, Agr;
- c. Pusat Penelitian Kependudukan, Kepala Puslitnya Drs. Moch. Saleh;
- d. Pusat Penelitian Perkoperasian, Kepala Puslitnya Drs. Soeradi Martowidjoyo, MS.

Dengan berlakunya Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya, maka Rektor kembali mengadakan penyempurnaan Susunan Organisasi Unibraw yang salah satunya adalah menerbitkan SK No. 64/SK/82 tanggal 29 Oktober 1982, mengangkat Dr. Saleh Syafradji sebagai Ketua Pusat Penelitian Unibraw. Berdasarkan SK Rektor No. 054/SK/1983 Tanggal 24 September 1983, kepemimpinan Dr. Saleh Syafradji digantikan oleh Dr. Ir. Iksan Semaoen.

Tahun 1985 Rektor Unibraw dengan SK No. 071/SK/1985 Tanggal 6 September 1985 membentuk Pusat pengembangan Ilmu Sosial dengan Ketua dr. Achmad



Hidayat, Wakil Ketua Ir. Noegroho dan Sekretaris Drs. Maryunani, kemudian berdasarkan SK Rektor No 047/SK/1986 tanggal 31 Juli 1986 mengangkat I Nyoman Nurjaya, SH., MS sebagai Ketua Pusat Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial menggantikan dr. Achmad Hidayat.

Selanjutnya Rektor Universitas Brawijaya tahun 1988 mengeluarkan SK No. 050/SK/1988 Tanggal 30 Juli 1988. Mengangkat Staf Bagian dan Koordinator Kelompok Penelitian pada Pusat Penelitian Universitas Brawijaya dengan susunan sebagai berikut:

- a. Staf Bagian Perencanaan Penelitian dan Affiliasi adalah: Dr.Ir.Moch. Munir;
- b. Staf Bagian Dokumentasi adalah: Drs. Mardiyono, MPA;
- c. Koordinator Kelompok Penelitian Studi Wanita adalah: Dr.Ir. Hesti Wijaya.

Pada tahun 1989 Rektor membentuk Tim Pelaksana Proyek Interdisciplinary Research (INRES) Universitas Brawijaya, untuk kelancaran pelaksanaan Proyek INRES yang merupakan kerjasama Universitas Brawijaya dengan NUFFIC, Ketua *Steering Committee* adalah DR. Ir. M. Iksan Semaoen, M.Sc yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Universitas Brawijaya. Tahun 1997 Proyek INRES dibubarkan dan semua aset/barang inventaris eks Proyek INRES dilimpahkan menjadi asset Pusat Penelitian Pembangunan Wilayah Pedesaan dan segala sesuatu dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian, ini tercantum pada SK Rektor Unibraw Nomor: 037/SK/1997 Tanggal 28 April 1997.

Tahun 1991 Rektor Unibraw mengangkat Sdr. Dr.Ir. Soemarno, MS sebagai Koordinator Kelompok Peneliti Industrialisasi Pedesaan pada Pusat Penelitian dengan menerbitkan SK. No.044/SK/1991 Tanggal 22 Juni 1991.

Tahun 1994 Dr.Ir.H.M. Iksan Semaoen, M.Sc Kepala Pusat Penelitian Unibraw diangkat sebagai Pjs. Direktur Program Pasca Sarjana Unibraw, digantikan oleh Dr.Ir. Luqman Hakim, MS sebagai Pjs. Kepala Pusat Penelitian Unibraw berdasarkan SK No. 088/SK/1994 Tanggal 2 Nopember 1994, dan Dr. Ir. Mochammad Munir, MS sebagai Sekretaris Pusat Penelitian Unibraw berdasarkan SK Rektor No. 089/SK/1994 Tanggal 2 Nopember 1994.

Pusat Penelitian diubah menjadi Lembaga Penelitian. Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya No. 09/SK/1996 Tanggal 15 Februari 1996 yang berlandasan pada Peraturan Pemerintah RI No. 30 Tahun 1990 Tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Tinggi, Kepmendikbud No. 0444/0/1992 Tanggal 18 Nopember 1992 tentang Statuta Universitas Brawijaya dan No. 0197/0/1995 Tanggal 18 Juli 1995



tentang Organisasi dan Tatakerja Universitas Brawijaya, yang intinya memberhentikan dengan hormat Dr. Ir. Luqman Hakim, MS dan Dr. Ir. Mochammad Munir, MS., masing-masing sebagai Kepala dan Sekretaris Pusat Penelitian Unibraw dan kemudian mengangkat kembali Dr. Ir. Luqman Hakim, MS dan Dr. Ir. Mochammad Munir, MS masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya.

Setelah dikeluarkannya Surat Keputusan di atas, maka Rektor Unibraw menerbitkan SK No. 030/SK/1996 Tanggal 10 April 1996 yang intinya membubarkan semua Pusat Penelitian/Studi yang ada sebelumnya dan membentuk Pusat-Pusat Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya membawahi sebagai berikut:

- a. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK);
- c. Pusat Penelitian Pembangunan Wilayah Pedesaan (PPPWP);
- d. Pusat Penelitian Ilmi Sosial (PPIS);
- e. Pusat Penelitian Peran Wanita (PPPW).

Dalam rangka lebih meningkatkan hasil penelitian yang berkaitan dengan peningkatan harkat makanan tradisional maka tahun 1997 dibentuk Pusat Kajian Makanan Tradisional (PKMT), berdasarkan SK Rektor Unibraw No. 11A/SK/1997 Tanggal 1 Maret 1997.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 pasal 43 bahwa : Lembaga Penelitian merupakan unsur pelaksana di Universitas Brawijaya dengan mengkoordinir, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan. Lembaga Penelitian Unibraw memiliki 5 (lima) Pusat dan 1 (satu) pusat kajian yaitu:

- a. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. Pusat Penelitian Kependudukan (PPK);
- c. Pusat Penelitian Pembangunan Wilayah Pedesaan (PPPWP);
- d. Pusat Penelitian Ilmu Sosial (PPIS);
- e. Pusat Penelitian Peran Wanita (PPPW);
- f. Pusat Kajian Makanan Tradisional (PKMT).

Kepemimpinan lembaga penelitian periode 1999 – 2003 dipimpin oleh Prof. Dr. Ir. Luqman Hakim, MS sebagai Ketua, Prof. Dr. Ir. Moch. Munir, MS sebagai



Sekretaris. Pada Periode 2004 – 2008 kepemimpinan dilanjutkan oleh Prof. Dr. Ir. Moch. Munir, MS.

Pimpinan Lembaga Penelitian periode tahun 2004 - 2008 adalah sebagai berikut:

- Ketua : Prof. Dr. Ir. Moch. Munir, MS (SK Rektor Unibraw No. 022A/SK/2004 Tanggal 1 Maret 2004).
- Sekretaris : Prof. Ir. I.N.G. Wardana, M. Eng, Ph.D (SK Rektor Unibraw No. 025/SK/2004 Tanggal 10 Maret 2004).

Pada tahun 2004, Prof. Dr. Ir. H. Mochammad Munir, MS., Ketua Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya diangkat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi, Depdiknas berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor: 109/MPN.A4/KP/2004 tanggal 31 Agustus 2004 menggantikan Prof. Dr. Ir. H. Dodi Nandika, MS yang telah ditetapkan sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

I.2 Sejarah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPM - UNBRAW) berdiri sejak Tahun 1973 sampai dengan 2008

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Brawijaya mulai dilaksanakan sejak tahun 1973. Pada saat itu belum banyak melibatkan tenaga pengajar khususnya dalam kegiatan kerjasama dengan instansi lain. Demikian pula, program Kuliah Kerja Nyata sebagai salah satu bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat, masih bersifat sukarela. Dari tahun ketahun, karena kegiatan semakin meningkat, maka pada tahun 1975 dibentuk Biro Pengabdian kepada Masyarakat (BPM) dengan SK Rektor No. 048/SK/1975.

Pada tahun 1978 dengan SK Rektor Unibraw No. 018/SKEP/1978 tanggal 8 Pebruari 1978 ditetapkan suatu Lembaga Pengabdian Masyarakat dan KKN dengan pimpinan M. Kafrawi, SH sebagai Direktur dan Drs. M. Widji Widodo sebagai Sekretaris berdasarkan SK Rektor No. 018/SKEP/1979 tanggal 28 April 1979, status Lembaga Pengabdian Masyarakat dan KKN Unibraw melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh tenaga dosen maupun oleh mahasiswa. Direktur pada saat itu Prof. Dr. Ir. H.M. Hasyim Baisoeni dan Sekretaris Drs. Samlawi Azhari, MS.

Pada tahun 1990 dengan SK. Rektor 102/SK/1990 tanggal 27 Desember 1990 Dr. Ir. Haryono, MApp.Sc menjabat sebagai pelaksana harian Pusat Pengabdian



Masyarakat dan tahun 1993 Pusat Pengabdian Masyarakat mengalami perubahan pimpinan :

- Ketua : Prof. Tanthawi, SE, dan
- Sekretaris : Dr. Ir.Haryono, MApp.Sc

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990, sejak 15 Pebruari 1996 berdasarkan SK Rektor No. 08/SK/1996, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat ditingkatkan statusnya menjadi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi, maka status kelembagaan pengabdian kepada masyarakat semakin mantap, yakni sebagai unsur pelaksanaan di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang pada saat itu untuk jajaran pimpinan sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Tanthawi, SE, dan
- Sekretaris : Dr. Suharyono, MA.

Tahun 1999 struktur pimpinan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat mengalami pergantian:

- Ketua : Prof.Dr. Ir. Syamsul Bahri. MS
- Sekretaris : Prof.Dr. Ir. Bambang Suharto, MS.

Pada tahun 2007, Prof. Dr. Ir. Bambang Suharto, MS. diangkat menjadi Pembantu Rektor I Universitas Brawijaya sehingga dengan SK Rektor no. 194/SK/2007 tanggal : 2 Mei 2007 Sekretaris Lembaga Pengabdian Masyarakat digantikan oleh Prof.Dr.Ir. Siti Chuzaemi, MS. Dalam Periode Antar Waktu sampai dengan tanggal : 10 Maret 2008 Pelaksana Harian Sekretaris Lembaga Penelitian yang definitif.

I.3 Sejarah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berdiri sejak Tahun 2008 sampai dengan Sekarang

Dalam upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tugas pokok dan fungsi Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat perlu dilakukan penggabungan kedua lembaga tersebut di Universitas Brawijaya. Pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 122A/SK/2008 tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (LEMLIT) dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM). Diikuti dengan

perubahan struktur organisasi dan pimpinan LPPM-UB sebagai berikut: Ketua, Wakil Ketua bidang Penelitian, Wakil Ketua bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sekretaris LPPM-UB :

Periode Tahun 2014 – Sekarang (Nama Pimpinan LPPM-UB)

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Prof. Dr. Ir. Woro Busono, MS. NIP: 19560403 198103 1 002	Ketua LPPM
2.	Dr. Ir. Maftuch, M.Si. NIP. 19660825 199203 1 001	Sekretaris LPPM
3.	Wayan Firdaus Mahmudy, S.Si, MT, Ph.D. NIP. 19720919 199702 1 001	Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Penelitian
4.	Dr. Ir. Atiek Ariany, MS. NIP. 19630809 198802 2 001	Ketua Kelompok Jabatan Fungsional Pengabdian
5.	Sri Aminin, SIP., M.AP NIP: 19631110 198503 2 002	Kepala Tata Usaha
6.	Mien Yantono, SE NIP: 19590120 198103 1 002	Kasubbag. Umum dan Keuangan
7.	Drs. Agus Budisiswanto NIP: 19680826 200701 1 001	Kasubbag. Program, Data & Informasi

Pusat Studi dan Pusat Pelayanan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sukir maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D	Pusat Studi Energi dan Sumber Daya Alam
2.	Dr. Siti Asmaul Mustanirroh, STP., MP.	Pusat Pelayanan Pengembangan Teknologi Tepat Guna
3.	Dr. Ir. Susinggih Wijana, MS	Pusat Layanan Kuliah Kerja Nyata
4.	Dr.Sc. Akhmad Sabarudin, M.Sc.	Pusat Penelitian Teknologi Sistem dan Material Maju atau Research Center for

NO.	NAMA	JABATAN
		Advanced System and Material Technology (ASMAT)
5.	Ir. Arifin Noor Sugiaharto, M.Sc. Ph.D	Pusat Studi jagung (Maixe Research Center)
6.	Drs. Adi Susilo, Msi., Ph.D	Pusat Studi Kebumian dan Mitigasi Bencana (PSKMB)
7.	Prof. Ir. Eko Handayanto, M.Sc., Ph.D	Pusat Studi Pengelolaan Lahan Terdegradasi dan Bekas Tambang atau Research Center for Management of Degraded and Mining Lands (RC-MEDMIND)
8.	Prof. Dr. Dra. Sjamsiar Sjamsuddin, MM.	Pusat Kajian Anti Korupsi
9.	Dr. Moch. Fadli, SH., M.Hum.	Pusat Penelitian Peradaban
10.	Dr. Ir. Purwadi, MS	Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI)
11.	Prof. Ir. Sukoso, M.Sc., Ph.D.	Pusat Studi Halal Thoyib atau Halal Thoyib Science Center (HTSC)
12.	Prof. Dr. Ir. Chandrawati Cahyani, MS	Pusat Riset Enterpreneurial Agroindustri Atsiri (PUREAA)
13.	Dr. Ir. Titiek Islami, MS	Pusat Studi tanaman Ubi-Ubian atau Centre for Tuber Crops Studies
14.	Prof. Dr. Ir. Ratya Anindita, MS.	Pusat Penelitian Budaya dan Laman Batas (Center

NO.	NAMA	JABATAN
		for Culture and Frontier Studies, CCFS)
15.	Dr. Ir. Sri Minarti, MP	Pusat Studi Gender
16.	Prof. Muhaimin Rifa'i, S.Si., Ph.D., Med.Sc	Pusat Studi Biosystem
17.	Dr. Ir. Sri Utami, MT	Pusat Studi Lingkungan Hidup
18.	Prof. Ir. Wani Hadi Utomo, Ph.D	Peningkatan Publikasi International Karya Ilmiah Dosen (PPIKID
19.	Dr. Teti Estiasih, STP., MP	Pusat Studi Pengembangan Pangan Lokal
20.	Prof. Dr. Ir. Simon Bambang Wijanarko, M.App. Sc.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Porang Indonesia
21.	Arief Hutoro, SE., MT., Ph.D	Pusat Pelayanan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (P4M)
22.	Dr. Rahma Fitriani, S.Si., M.Sc	Pusat Layanan Pengelolaan data dan Informasi
23.	Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng., D.Sc	Pusat Studi Pesisir dan Kelautan
24.	Siti Kholifah, Ph.D	Pusat Studi Pesantren dan Pemberdayaan Masyarakat
25.	Dr. Muhammad Halim Natsir, S.Pt., MP	Pusat Pengembangan Manajemen Penelitian / PHK

NO.	NAMA	JABATAN
26.	Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS	Pusat Inkubator Bisnis dan Layanan masyarakat / PIBLAM

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat disusun dengan maksud menentukan dan merencanakan terlebih dahulu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) pada waktu yang akan datang. RENSTRA LPPM merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM dalam jangka waktu lima tahun ke depan (Tahun 2016-2021). Turunan dari RENSTRA bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM adalah program dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM yang bersifat **social entrepreneurship** yang mengedepankan isu Global, Nasional, dan Kewilayahan dengan indikator kinerja yang bersifat kewilayahan, yaitu peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, serta pelayanan sosial dasar. Arahan kebijakan dalam pengelolaan bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM dengan atau berdasarkan oleh Peraturan Rektor Universitas Brawijaya.

Berdasarkan dinamika pembangunan maka dapat diperinci isu-isu strategis pembangunan Jawa Timur ke depan, sebagai berikut:

- A. Isu Internasional**, meliputi : gejolak perekonomian global, lingkungan hidup, Millenium Development Goal's (MDG's), MEA, ancaman global terhadap krisis pangan, energi, air, transportasi,
- B. Isu Regional**, meliputi : daya saing nasional dalam AEC, dan Transportasi
- C. Isu Nasional**, meliputi : Semakin Besarnya Subsidi dan Instabilitas Harga Komoditi, Situasi Pangan Nasional, Implementasi Undang-undang Desa dalam lingkup Kewenangan Provinsi, Infrastruktur, Penerapan SPM, Gender, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Lingkungan Hidup serta Energi.
- D. Isu Strategis Jawa Timur**, meliputi : Menuju Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Peningkatan kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM, Disparitas Wilayah, Infrastruktur, Pengangguran, Energi, Lingkungan Hidup,



IPM, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kemiskinan, Kerjasama Daerah, Komunikasi dan Informatika, Penanggulangan Bencana,

Dengan mempertimbangkan hasil yang sudah dicapai RPJMD Jawa Timur pada tahapan tahun I dan II, pada tahapan tahun ketiga (2014-2019) mendatang Pemerintah Provinsi Jawa Timur menetapkan arah kebijakan ditujukan lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta didukung dengan kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Oleh karena itu, berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di berbagai Fakultas melalui Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM Fakultas) di bawah koordinasi LPPM melalui skema dana DPP/SPP, kerjasama dengan institusi luar UB, dan program hibah pengabdian dari KEMENRISTEKDIKTI dengan memperhatikan isu strategis pada kancah Global, Nasional, dan Kewilayahan.

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan LPPM UB dari tahun 2011-2015 berdasarkan 5 tahun terakhir dan analisis SWOT, meliputi 6 (enam) bidang unggulan yang juga berkesesuaian dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) UB dan merupakan terjemahan dari *social entrepreneurship*, yaitu meliputi :

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi
2. Transfer dan Difusi Teknologi
3. Inovasi IPTEKS dan Kelembagaan
4. Pengembangan Kearifan Lokal
5. Pelayanan Sosial Dasar
6. Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan

Selanjutnya, Program Kerja LPPM pada dasarnya mengacu kepada Renstra Universitas Brawijaya, dimana program kerja LPPM ditujukan untuk mengakselerasi kinerja Pengabdian kepada Masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas yang mendukung proses pengembangan UB menjadi World Class and Entrepreneurial University, sebagai berikut :

Program Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Pemberdayaan Guru Besar dan dosen sebagai pegembang kelompok pengabdian kepada masyarakat.

- 
- b. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pengembangan bertaraf internasional berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat baik ditingkat Universitas maupun Fakultas.
 - c. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga mitra baik nasional dan internasional di sektor publik dan dunia usaha
 - d. Meningkatkan publikasi dalam bentuk prosiding karya pengabdian kepada masyarakat agar dapat direplikasi oleh pemangku kepentingan
 - e. Meningkatkan budaya implementasi karya pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan penulisan jurnal ilmiah.
 - f. Meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat.
 - g. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pusat-pusat pengabdian khususnya tingkat fakultas.
 - h. Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mendesiminasikan karya dalam bentuk prosiding
 - i. Mengembangkan terciptanya inovasi teknologi tepat guna untuk mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di semua strata dan di berbagai sektor.

Pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 merupakan kegiatan sivitas akademik adalah mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Civitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 53 terdiri atas:

- a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Pasal 54 merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam



menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- 2) Pemanfaatan teknologi tepat guna dan hasil rekayasa sosial;
- 3) Mengedepankan prinsip keberlanjutan karya pengabdian kepada masyarakat;
- 4) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; atau bahan ajar dan modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar isi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Pasal 55 merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) Karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
- 2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam rangka memberdayakan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat;
- 3) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekayasa kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah;
- 4) Publikasi dalam bentuk prosiding atau buku modul karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar proses pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Pasal 56 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada



masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- 1) Pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna sesuai dengan bidang keahliannya;
- 3) Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- 4) Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat menurut Pasal 57 merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan karya pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 
- 5) Keberlanjutan, yang menekankan pada penilaian proses dan karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat diterapkan di masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) Tingkat kepuasan masyarakat;
- 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna di masyarakat secara berkelanjutan;
- 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna; atau
- 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Pasal 58 merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada



masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat.

f. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Pasal 59 merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Pasal 60 merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Kelembagaan wajib untuk:

- 1) Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- 3) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

- 4) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- 5) Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- 7) Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- 8) Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama; dan
- 9) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- 10) Menyusun laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.

RENSTRA LPPM sebagai acuan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh peneliti/dosen UB, tidak lepas Rencana Induk Pengembangan UB 2011-2015. RENSTRA LPPM disusun berdasarkan kebijakan dari Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi masukan bagi Tahap Perumusan Strategi dan Tahap Perencanaan Strategi seperti pada Gambar 1.1.



Gambar 2. 1 Skema Pengembangan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM-UB



II LANDASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT

2.1 Visi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat – LPPM UB

Menjadi Lembaga Berstandar Internasional yang Mampu Berperan Aktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

2.2 Misi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat – LPPM UB

1. Menyusun payung Pengabdian kepada Masyarakat berbasis IPTEK;
2. Mengembangkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan, menuju kemandirian masyarakat.
3. Meningkatkan kontribusi Universitas Brawijaya melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada skala nasional dan internasional.
4. Mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui hilirisasi karya pengabdian dan implementasi IPTEK.
5. Meningkatkan kualitas dan jatidiri sumberdaya manusia calon pimpinan masyarakat yang berwawasan jauh ke depan, memiliki sikap kewirausahaan yang kompetitif dan unggul dalam memasuki maupun menciptakan pasar kerja;
6. Memberdayakan masyarakat dengan mengangkatnya dari keterbelakangan, mengentaskannya dari kemiskinan, meningkatkan kemampuan sebagai subyek pembangunan melalui proses pengembangan ilmu pengetahuan.

2.3 Tujuan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat – LPPM UB

1. Mengembangkan manajemen Pengabdian kepada Masyarakat dalam struktur organisasi LPPM-UB dengan manajemen yang sehat;
2. Mengembangkan kualitas dan kuantitas karya Pengabdian kepada Masyarakat untuk mendukung pencapaian Visi yang mampu melintasi daya saing wilayah nasional dan internasional

- 
3. Meningkatkan karya Pengabdian kepada Masyarakat yang diarahkan kepada pengembangan, pemanfaatan, penuntasan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya hayati dan kelautan, teknologi, budaya, sosial budaya kemasyarakatan, dan kesehatan;
 4. Memberikan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan relevansi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 5. Menyiapkan pimpinan bangsa (*leardership*) melalui sosial enterpreneurship, dan mampu mengkolaborasikan potensi masyarakat.

2.4 Analisis Kondisi Saat Ini

2.4.1 Riwayat perkembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan Penelitian Universitas Brawijaya dilaksanakan oleh pusat penelitian yang ada di Universitas Brawijaya, keberadaannya sejak tahun 1978. Pada waktu itu, pusat penelitian yang ada hanya melaksanakan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan bersifat multidisiplin ilmu. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan organisasi di Universitas Brawijaya, maka pada tahun 1996 dengan SK Rektor No 09/SK/1996 tanggal 15 Pebruari 1996, Pusat penelitian dirubah menjadi Lembaga Penelitian (LEMLIT) Universitas Brawijaya, yang membawahi beberapa pusat penelitian meliputi : Pusat Penelitian lingkungan Hidup (PPLH), Pusat Penelitian Ilmu Sosial (PPIS), Pusat Penelitian Kependudukan (PPK), Pusat Penelitian Pembangunan Wilayah Pedesaan (PPPWP), Pusat Penelitian Peran Wanita (PPPW), Pusat kajian Makanan Tradisional (PKMT) dan Sentra HKI, sejalan dengan perkembangan IPTEK dan tuntutan masyarakat, pada tahun 2007, pusat penelitian yang ada juga mengalami perkembangandari 4 pusat penelitian menjadi 6 pusat penelitian, dan pada tahun 2012 terdapat dua pusat baru, menjadi 11 pusat penelitian dan 1 sentra HKI :

1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH)
2. Pusat Penelitian Gender dan Kependudukan (PPG&K)
3. Pusat Penelitian Ilmu Sosial (PPIS)
4. Pusat Penelitian Biokonversi (PPB)
5. Pusat Penelitian Kebumian, dan Mitigasi Bencana (PPKMB)

- 
6. Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia (P4I)
 7. Pusat Penelitian Pembangunan dan Inovasi Daerah (P3ID)
 8. Pusat Kajian Kerjasama Selatan Selatan (PKKSS)
 9. Pusat Penelitian Peradaban (P3)
 10. Pusat Penelitian halal Thoyib Science Center (PPHTSC)
 11. Pusat Penelitian Budaya dan Iman Batas
 12. Sentra HKI.

Demikian juga, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan sejak tahun 1973, pada saat itu belum banyak melibatkan tenaga pengajar khususnya dalam kegiatan kerjasama dengan instansi lain, demikian juga dengan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) masih bersifat sukarela. Karena kegiatan semakin meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan organisasi, maka pada tahun 1975 dibentuk Biro Pengabdian kepada Masyarakat (BPM) dan pada tahun 1996, tepatnya tanggal 15 Pebruari 1996, sesuai SK Rektor No : 08/SK/1996, statusnya dirubah menjadi Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM), secara khusus mengelola, mengkoordinir semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, KKN dan kegiatan kerjasama, yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, serta pengkajian untuk kepentingan kemajuan masyarakat dan pembangunan, meliputi :

1. Pusat Pelayanan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat (P4M)
2. Pusat Pelayanan Pengembangan Sumberdaya Alam (P3SDA)
3. Pusat Pelayanan Pengembangan Teknologi (P3T)

Dalam upaya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi tugas pokok dan fungsi Lembaga Penelitian dan Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat perlu dilakukan penggabungan kedua lembaga tersebut di Universitas Brawijaya. Pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan SK Rektor Universitas Brawijaya Nomor: 122A/SK/2008 tentang Penggabungan Lembaga Penelitian (LEMLIT) dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM). Kemudian sesuai dengan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 164 tahun 2015 ditetapkan Struktur Organisasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Brawijaya untuk lebih memudahkan koordinasi dan meningkatkan kinerja lembaga. Keberadaan Pusat-Pusat dan layanan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ada dapat dilakukan buka tutup sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.



2.4.2 Capaian kinerja

LPPM UB telah mencapai standar kualitas kelembagaan dan kinerja yang sangat baik. Hal ini ditandai oleh prestasi-prestasi sebagai berikut :

1. LPPM telah bersertifikasi ISO 9001:2008, dan memperoleh penghargaan ke-2 *University Brawijaya Academic Quality Award (UBACQA)* 2012.
2. Pengabdian kepada Masyarakat pada tahun 2013 sebanyak 47 kegiatan dengan jumlah dana Rp 2.708.123.000,00, tahun 2014 sebanyak 63 kegiatan dengan jumlah dana Rp 3.641.605.000,00, dan tahun 2015 sebanyak 57 kegiatan dengan jumlah dana Rp 2.933.750.000,00.
3. Kerjasama dengan mitra kerjasama pada tahun 2014 sebanyak 57 kegiatan kerjasama dengan jumlah dana sebesar Rp. 16.079.842.525,00 dan tahun 2015 sebanyak 11 kerjasama dengan dana Rp. 4.370.400.000,00.

2.4.3 Peran Unit Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berperan sebagai fasilitator dan koordinator berbagai kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang terjadi di lingkup Universitas Brawijaya. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya telah menunjukkan peran yang sangat signifikan dalam kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di tingkat regional hingga nasional. Kegiatan kerjasama sejak awal kelahirannya, LPPM UB telah menjalin beberapa Kerjasama penelitian dengan :

1. Pemerintah pusat, propinsi dan daerah.
2. Lembaga swadaya masyarakat.
3. TNI/Polri.
4. Berbagai departemen/kementerian.
5. Perguruan tinggi lain.
6. Masyarakat umum termasuk industri.
7. *Funding* asing.

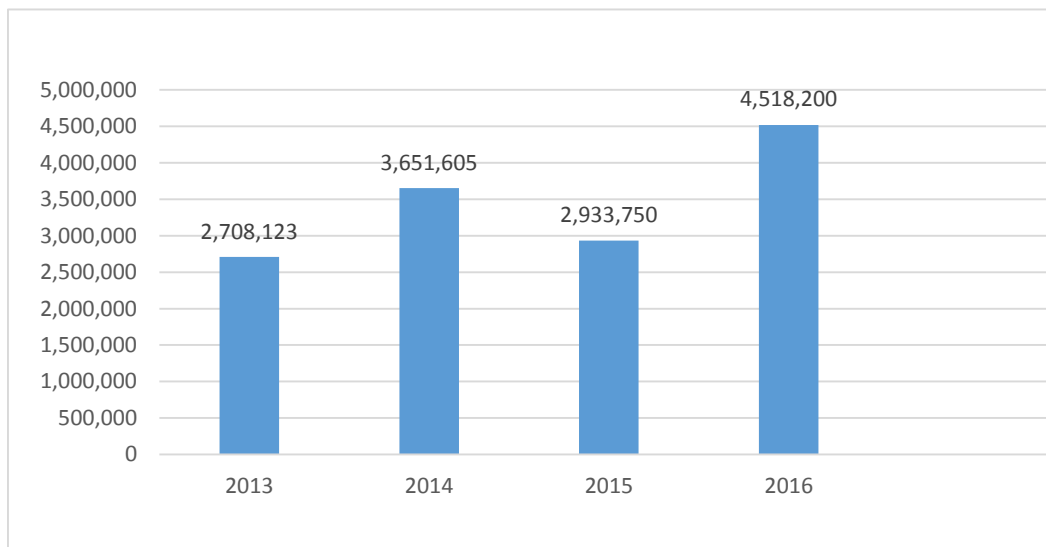
Perolehan paten dari hasil penelitian yang dilakukan dosen UB oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak penelitian telah memperoleh paten dan diakui sebagai Hak Kepemilikan Intelektual (HKI).

Penelitian terapan yang dilakukan oleh LPPM UB juga telah membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan oleh LPPM UB telah berhasil meningkatkan kesadaran dan membantu memberikan solusi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

2.4.4 Potensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

A. Potensi Bidang Riset dan Data PKM Mahasiswa

Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diterima oleh LPPM UB berasal dari beberapa sumber, yaitu Universitas Brawijaya, DIKTI Kemendiknas, LIPI, dan mitra kerjasama. Adapun jumlah pengabdian kepada masyarakat serta kerjasama selama 4 (empat) tahun (dalam angka ribuan) sebagai berikut:



1. Tahun 2013

Pengabdian masyarakat dengan sumber dana dari Universitas Brawijaya, DIKTI Kemendiknas, LIPI, dan mitra kerjasama berjumlah 2.708.123.

2. Tahun 2014

Pengabdian masyarakat dengan sumber dana dari Universitas Brawijaya, DIKTI Kemendiknas, LIPI, dan mitra kerjasama berjumlah 3.651.605.

3. Tahun 2015

Pengabdian masyarakat dengan sumber dana dari Universitas Brawijaya, DIKTI Kemendiknas, LIPI, dan mitra kerjasama berjumlah 2.933.750.

4. Tahun 2016

Pengabdian masyarakat dengan sumber dana dari Universitas Brawijaya, DIKTI Kemendiknas, LIPI, dan mitra kerjasama berjumlah 4.518.200.

B. Potensi bidang SDM

1. Jumlah personalia penelitian dan pengabdian kepada masyarakat cukup besar. Universitas Brawijaya mempunyai 1440 dosen, 100 laboran dan 46 pustakawan di Universitas Brawijaya.
2. Jumlah tenaga pengabdian aktif cukup besar. Pada kegiatan pengabdian tahun 2013 terdapat 128 dosen yang terlibat, tahun 2014 terdapat 169 dosen yang terlibat dan tahun 2015 terdapat 138 dosen yang terlibat. Sedangkan untuk kerjasama dengan mitra kerjasama pada tahun 2014 terdapat 57 dosen yang terlibat dan tahun 2015 terdapat 35 dosen yang terlibat.
3. Kualitas sumberdaya manusia yang sangat memadai. *Knowledge, skill* dan *attitude* sumberdaya manusia umumnya sangat menunjang kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Potensi bidang sarana dan prasarana

1. Penelitian didukung oleh *resource sharing* dari 25 laboratorium riset dengan peralatan sangat memadai.
2. Universitas Brawijaya mempunyai 7 (tujuh) kebun percobaan dengan luas sekitar 100 hektar.
3. Universitas Brawijaya mempunyai laboratorium lapang peternakan dengan luas sekitar 5 hektar.
4. Telah ada *memorandum of understanding* dengan berbagai pemerintah daerah, organisasi dan laboratorium-laboratorium di seluruh Indonesia dan di luar negeri untuk kerjasama penelitian.
5. Laboratorium Sentral Ilmu Hayati yang telah bersertifikasi ISO.
6. Laboratorium kultur jaringan di Fakultas MIPA dan Fakultas Pertanian.
7. Laboratorium Organik bahan Alam di Fakultas MIPA dengan penelitian yang sangat banyak baik mahasiswa S1 maupun S2 di bidang bahan alam, khususnya atsiri.
8. Laboratorium tanah yang telah berpengalaman panjang dalam analisis kondisi/ kesesuaian lahan di Jawa maupun luar Jawa.

- 
9. Laboratorium mekanisasi pertanian mempunyai kelengkapan peralatan untuk melakukan rekayasa peralatan proses, diantaranya peralatan proses penyuling berbagai minyak atsiri.

D. Potensi Organisasi dan Manajemen

1. Struktur organisasi yang ramping dan desentralistis memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.
2. Pertanggungjawaban pengambilan keputusan ada pada pusat-pusat penelitian sehingga memperluas akuntabilitas publik.
3. Sistem manajemen mutu (SMM) berbasis ISO 9001:2008 memungkinkan sistem mencapai tingkat akuntabilitas dan transparansi publik yang memadai.

III GARIS BESAR RENSTRA-PPM PT

3.1 Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan

3.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan kemanfaatan IPTEK PT bagi kehidupan masyarakat di suatu wilayah dalam wujud perbaikan kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan
2. Meningkatkan *critical mass* dan kualitas Dosen Pelaksana pengabdian PT dalam melaksanakan darma Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Mensinergikan Renstra dan program Pengabdian kepada Masyarakat seluruh PT di suatu wilayah (provinsi) yang merefleksikan Kebhinekaan Intelektual dalam meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat
4. Meningkatkan utilisasi fasilitas PT dan institusi lain dalam mendukung aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat PT

3.1.2 Sasaran

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya, serta pelayanan sosial dasar
2. Meningkatkan *critical mass* dosen pelaksana pengabdian masyarakat
3. Meningkatkan daya saing bangsa

3.2 Strategi dan Kebijakan Unit Kerja:

3.2.1 Strategi Pengembangan Unit Kerja LPPM/LPM/P3M PT

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan terkait potensi yang ada di PPM-PT serta permasalahan yang ada di dalamnya. Potensi dan masalah tersebut dianalisis pada SWOT yang juga telah dijelaskan pada bab II. Berdasarkan analisis SWOT tersebut berikut strategi yang dapat dilaksanakan pada masa yang akan datang agar meminimalisir kekurangan dan mengoptimalkan potensi PPM-PT terutama terkait pengabdian kepada masyarakat.

- a) Pengoptimalan kuantitas dan kualitas karya pengabdian kepada masyarakat untuk dapat bersaing dengan kompetitor baik dari dalam maupun luar negeri
- b) Pengembangan sarana prasarana serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih modern agar dapat mengimbangi kemajuan globalisasi.

- 
- c) Terciptanya integrasi antara LPPM dan organisasi desentralistis dalam pusat-pusat layanan masyarakat dimana akuntabilitas dan transparansi merupakan tombak utama yang akan terus diprioritaskan.
 - d) Pengembangan jaringan antar lembaga dan pusat sumber daya baik bersifat bisnis maupun non bisnis dalam skala nasional maupun internasional terkait kerja sama dalam pengembangan sistem pengabdian masyarakat.
 - e) Pengembangan jaringan LPPM Universitas Brawijaya pada daerah-daerah strategis dalam pengabdian masyarakat, yaitu tempat-tempat perifer, daerah pusat kekuasaan, dan sumber daya potensi wilayah
 - f) Peningkatan publikasi berupa ekspose media massa agar proses dan hasil karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh semua kalangan.
 - g) Pengalokasian sumber daya yang berpegang pada prinsip good governance untuk meningkatkan potensi yang ada pada wilayah-wilayah strategis
 - h) Mengembangkan daya kreativitas dan inovasi kelompok-kelompok pengabdian dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas karya pengabdian masyarakat.

3.2.2 Formulasi Strategi Pengembangan

- a) Peningkatan prestasi terkait standar kualitas kelembagaan dan kinerja program pengabdian kepada masyarakat.
- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama dengan lembaga atau institusi baik dalam negeri maupun luar negeri
- c) Mengoptimalkan potensi sarana prasarana serta organisasi dan manajemen untuk menunjang pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat.
- d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada pada PPM agar selalu mencukupi kebutuhan terkait pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat.
- e) Meningkatkan jumlah kegiatan pengabdian dari tahun ke tahun untuk menggali potensi dan mendapatkan solusi pada wilayah-wilayah strategis yang membutuhkan sentuhan karya Pengabdian kepada Masyarakat

Tabel
Analisis SWOT RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat UB

Nilai: 0 = jelek; 1 = kurang; 2 = cukup; 3 = baik; 4 = sangat baik

No	Unsur	B	Kekuatan				Kelemahan				Peluang				Ancaman			
			Keterangan	B	N	NxB	Keterangan	B	N	NxB	Keterangan	B	N	NxB	Keterangan	B	N	NxB
1.	Sumber Daya Manusia	25	Jumlah dan kualitas tenaga akademik serta kinerja yang tinggi	7.5			Lemahnya kemampuan negosiasi SDM untuk mengakses dana-dana eksternal				Terbangunnya relasi dengan berbagai <i>stakeholders</i>				Persaingan dengan PT lain			
			Komposisi kompetensi keilmuaan dosen yang lengkap	7.5			Kurangnya implementasi paten				Terbangunnya sistem jaringan informasi yang cukup luas				Persaingan dengan NGO's			
			Jumlah paten yang dihasilkan dosen UB (TTG) terbanyak di Indonesia	5			Pemanfaatan dana untuk membangun kerjasama belum optimal				Terbuka peluang kerjasama dengan pemerintah (provinsi, kabupaten/kota, desa)				Persyaratan untuk mengakses dana CSR memerlukan sertifikasi kompetensi			
			Jumlah mahasiswa ...	5			Beban <i>administrative</i> cukup tinggi sehingga memperlemah kapasitas akademik				Kebutuhan pendampingan implementasi UU No 6 Th 2014 tentang Desa							
							Kurangnya optimasi SDM yang berkompeten				Kebutuhan masyarakat akan penerepan IPTEK							

[illegible]

3.	Organisasi dan Manajemen	10	Struktur organisasi yang efektif				Kurangnya dana untuk manajemen program				Adanya pelatihan yang diberikan oleh KEMENRISTEKDIKTI dan ISO				Keharusan sertifikasi untuk sistem manajemen			
			Adanya pusat penjaminan mutu (PJM)				Lemahnya enforcement hasil tindak lanjut PJM											
			LPPM masuk dalam OTK UB untuk mengkoordinasikan kegiatan pengabdian masyarakat				Kurangnya reward dalam melakukan kegiatan abdimas											
			Kepemimpinan publik yang handal															
			Adanya corporate culture yang baik															
4.	Jalinan Kerjasama	20	Kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah yang banyak				Tindak lanjut kerjasama yang masih lemah				Tawaran kerjasama dari stakeholder mengalami peningkatan				Persaingan dari berbagai lembaga semacam dan lembaga yang berbeda (seperti NGO's)			
			Adanya pengabdian unggulan yang kompetitif				Orientasi kerjasama yang bersifat parsial dan berjangka pendek (<i>Continuitas</i> kurang optimal)								Perkembangan dan kemajuan perguruan tinggi lain			
							Lemahnya posisi tawar											

						terhadap lembaga donor													
						Lemahnya legal aspect													
5.	Letak dan Tata Kelola	10	Lokasi kegiatan abdimas yang strategis dan terjangkau			Exit program sebagian abdimas masih kurang				Memungkinkan kerjasama dengan stakeholders stempat dalam hal tatakelola abdimas					Perubahan kebijakan pemerintah daerah				
						Belum melakukan zonasi dan clustering abdimas									Gangguan dari para pemodal (moral hazard)				
6.	Sumber Daya Finansial	20	Tersedia dana PNBPN untuk abdimas universitas			Komitmen pendampingan dana kurang				Tersedia cukup banyak dana abdimas (kompetitif nasional dan CSR)					Kompetisi dari PT dan NGO's dalam mengakses dana abdimas				
										Sharing dana dengan mitra abdimas									
JUMLAH						JUMLAH				JUMLAH					JUMLAH				

“RAPID GROWTH STRATEGY/ KWADRAN I”

Tabel 1.a.
Matriks SWOT SDM

1. Sumber Daya Manusia

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	Memiliki kekuatan SDM (jumlah dan kualitas dosen dan mahasiswa) serta komposisi kompetensi keilmuan yang lengkap dan tinggi sehingga dapat membangun relasi, kerjasama dan jaringan informasi dengan berbagai pihak	Lemahnya kemampuan negosiasi SDM untuk mengakses dana-dana eksternal padahal dana eksternal yang tersedia cukup banyak/tinggi
	Kekuatan SDM (jumlah dan kualitas dosen dan mahasiswa) serta komposisi kompetensi keilmuan yang lengkap dan tinggi juga membuka peluang untuk terlibat secara aktif dalam pendampingan implementasi UU No. 6 Th 2014 tentang Desa	Pemanfaatan dana internal untuk membangun kerjasama belum optimal padahal peluang kerjasama terbuka, implementasi paten juga masih lemah
		Ketertarikan SDM (dosen dan mahasiswa) pada kegiatan abdimas lemah karena tingginya beban administratif dan perkuliahan padahal kekuatan SDM dan kompetensinya tinggi
ANCAMAN (T)	Memiliki kekuatan SDM yang tinggi bila tidak disertai dengan sertifikasi kompetensi merupakan hal yang sia-sia oleh karena tingginya persaingan dengan PT dan NGO lainnya	Kemampuan negosiasi SDM untuk mengakses dana-dana eksternal lemah padahal tingkat persaingan dengan PT dan NGO lain tinggi
		Ketertarikan SDM (dosen dan mahasiswa) pada kegiatan abdimas lemah, keterlibatan mahasiswa juga rendah, optimasi SDM yang berkompeten untuk <i>updating</i> data riset juga kurang
		Akses dana CSR memerlukan sertifikasi kompetensi, implementasi paten juga masih lemah

Tabel 1.b.
Alternative Solusi SDM

No	Unsur	Alternative Solusi
1.	SDM	1. Mendorong peningkatan kemampuan SDM melalui sertifikasi kompetensi keilmuannya 2. Peningkatan kemampuan keilmuan dan negosiasi bagi SDM untuk <i>updating</i> data riset guna mengakses dana-dana eksternal dan CSR 3. Mendorong SDM untuk mengimplementasikan paten dan pendampingan implementasi UU tentang Desa

Tabel 2.a.
Matriks SWOT SARANA PRASARANA

2. Sarana Prasarana

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	Memiliki jenis peralatan dan keragaman laboratorium dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan efektif sehingga membuka peluang kemitraan dan <i>resource sharing</i>	Banyaknya peralatan dan laboratorium yang belum beroperasi secara optimal padahal peluang kemitraan dalam kegiatan abdimas terbuka luas
	Adanya KPRI, BUA, BUNA, Pusat Studi dan Pusat Layanan yang memungkinkan berkembangnya peluang kemitraan dan <i>resource sharing</i> dengan eksternal stakeholders	Mekanisme <i>resource sharing</i> yang lemah padahal peluang berkembangnya <i>resource sharing</i> dengan pihak eksternal stakeholders cukup tinggi
		Belum terintegrasinya pendekatan program abdimas padahal peluang kemitraan dan <i>resource sharing</i> dengan pihak eksternal stakeholders untuk abdimas terbuka luas
	Memiliki jenis peralatan dan keragaman laboratorium dengan jumlah dan kualitas yang memadai namun belum semuanya memenuhi persyaratan sertifikasi untuk kegiatan abdimas	Banyaknya peralatan dan laboratorium yang belum beroperasi secara optimal disebabkan rendahnya keterhandalan

ANCAMAN (T)	Memiliki jenis peralatan dan keragaman laboratorium dengan jumlah dan kualitas yang memadai namun keterandalannya rendah	Mekanisme <i>resource sharing</i> yang lemah, pendekatan program abdimas belum terintegrasi, sarana prasarana belum handal serta banyak yang belum memenuhi persyaratan sertifikasi
------------------------	--	---

Tabel 2.b.
Alternative Solusi Sarana Prasarana

No	Unsur	Alternative Solusi
2.	Sarana Prasarana	Peningkatan mekanisme <i>resource sharing</i> dengan pihak eksternal maupun internal stakeholders (KPRI, BUA, BUNA, antar Pusat Studi dan Pusat Layanan)
		Peningkatan pendekatan program abdimas secara terintegrasi dengan pihak eksternal maupun internal stakeholders
		Peningkatan keterandalan sarana prasarana laboratorium baik jenis peralatan maupun keragaman laboratoriumnya
		Peningkatan persyaratan sertifikasi untuk sarana prasarana laboratorium untuk jenis peralatan dan keragaman laboratoriumnya

Tabel 3.a.
Matriks SWOT ORGANISASI DAN MANAJEMEN

3. Organisasi dan Manajemen

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	Struktur organisasi yang efektif dengan kepemimpinan dan corporate culture yang baik menunjang mudahnya dilakukannya kegiatan pelatihan oleh Kemenristekdikti dan ISO	Kurangnya dana untuk manajemen program dalam mengimplementasikan kegiatan pelatihan oleh Kemenristek dan ISO
	Adanya PJM dan OTK UB untuk LPPM yang juga menunjang mudahnya dilakukannya kegiatan pelatihan oleh Kemenristekdikti dan ISO	Lemahnya <i>enforcement</i> dan kurangnya <i>reward</i> dalam melakukan kegiatan abdimas padahal kegiatan pelatihan oleh Kemenristek dan ISO cukup sering dilakukan
ANCAMAN (T)	Sistem manajemen yang ada mengharuskannya tersertifikasi	Sistem manajemen yang ada mengharuskannya tersertifikasi padahal dana kurang
		Lemahnya <i>enforcement</i> dan kurangnya <i>reward</i> dalam melakukan kegiatan abdimas oleh dosen/mahasiswa

Tabel 3.b.
Alternative Solusi Organisasi dan Manajemen

No	Unsur	Alternative Solusi
3.	Organisasi dan Manajemen	Peningkatan dana untuk manajemen program dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan abdimas (Kemenristek dan ISO)
		Peningkatan <i>enforcement</i> dan <i>reward</i> oleh pihak manajemen bagi dosen/mahasiswa yang melakukan kegiatan abdimas
		Peningkatan status sistem manajemen yang tersertifikasi

Tabel 4.a.
Matriks SWOT JALINAN KERJASAMA

4. Jalinan Kerjasama

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	- Kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah yang banyak dan tawaran kerjasama dari stakeholder mengalami peningkatan, termasuk pengabdian unggulan yang kompetitif	- Tindak lanjut dan orientasi kerjasama yang masih lemah, parsial dan berjangka pendek meskipun tawaran kerjasama dari stakeholder mengalami peningkatan
		- Lemahnya posisi tawar terhadap lembaga donor dan <i>legal aspectnya</i> , meskipun tawaran kerjasama dari stakeholder mengalami peningkatan
ANCAMAN (T)	• Kerjasama dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah yang banyak termasuk tersedianya pengabdian unggulan yang kompetitif, namun persaingan dan perkembangan PT dan NGO lain juga cukup pesat	- Tindak lanjut kerjasama yang masih lemah padahal perkembangan PT dan NGO lain cukup pesat
		- Orientasi kerjasama yang bersifat parsial dan berjangka pendek padahal perkembangan PT dan NGO lain cukup pesat
		- Lemahnya posisi tawar terhadap lembaga donor dan <i>legal aspectnya</i> padahal perkembangan PT dan NGO lain cukup pesat

Tabel 4.b.
Alternative Solusi Jalinan Kerjasama

No	Unsur	Alternative Solusi
4.	Jalinan Kerjasama	Peningkatan orientasi kerjasama yang bersifat integral dan berjangka panjang
		Mendorong peningkatan posisi tawar terhadap lembaga donor dan termasuk <i>legal aspectnya</i> , pada kegiatan bidang abdimas (utamanya pada pengabdian unggulan yang kompetitif) dan bidang kerjasama
		Mendorong peningkatan tindak lanjut kerjasama yang telah dijalin pada segenap stake holder

Tabel 5.a.
Matriks SWOT LETAK DAN TATA KELOLA

5. Letak dan Tata Kelola

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	- Lokasi kegiatan abdimas yang strategis dan terjangkau sehingga memungkinkan kerjasama dengan stakeholders stempat dalam hal tatakelola abdimas	- Luaran program sebagian abdimas yang masih kurang namun masih memungkinkan kerjasama dengan stakeholders stempat
		- Belum dilakukannya zonasi dan clustering abdimas meskipun dimungkinkannya kerjasama dengan stakeholders stempat
ANCAMAN (T)	- Lokasi kegiatan abdimas yang strategis dan terjangkau namun seringkali ada gangguan dari para pemodal (moral hazard) dan perubahan kebijakan pemerintah daerah	- Luaran program sebagian abdimas yang masih kurang sementara itu seringkali terjadi perubahan kebijakan pemerintah daerah dan gangguan dari para pemodal (moral hazard)
		- Belum dilakukannya zonasi dan clustering abdimas sementara itu juga seringkali terjadi perubahan kebijakan pemerintah daerah dan gangguan dari para pemodal (moral hazard)

Tabel 5.b.
Alternative Solusi Letak dan Tata Kelola

No	Unsur	Alternative Solusi
5.	Letak dan Tata Kelola	Peningkatan kualitas luaran program abdimas Dilakukannya zonasi dan clustering abdimas bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat pada lokasi wilayah yang strategis dan terjangkau

Tabel 6.a.
Matriks SWOT SUMBERDAYA FINANSIAL

6. Sumberdaya Finansial

	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
PELUANG (O)	- Tersedia dana internal PNBPN untuk abdimas universitas disamping dana dari abdimas kompetitif nasional, CSR dan mitra lainnya	- Komitmen pendampingan dana kurang meskipun cukup banyak dana dari abdimas kompetitif nasional, CSR dan mitra lainnya
ANCAMAN (T)	- Tersedia dana internal PNBPN untuk abdimas universitas, namun dalam mengakses dana abdimas eksternal lainnya ada kompetisi dari PT dan NGO's	- Komitmen pendampingan dana kurang dan dalam mengakses dana abdimas eksternal lainnya ada kompetisi dari PT dan NGO's

Tabel 6.b.
Alternative Solusi Sumberdaya Finansial

No	Unsur	Alternative Solusi
6.	Sumberdaya Finansial	Peningkatan dana internal PNBPN sebagai dana pendampingan dengan tetap mengakses dana abdimas kompetitif nasional, CSR dan mitra lainnya

Tabel 7
Kesimpulan Alternative Solusi

No	Unsur	Alternative Solusi
1.	SDM	1. Mendorong peningkatan kemampuan SDM melalui sertifikasi kompetensi keilmuannya
		2. Peningkatan kemampuan keilmuan dan negosiasi bagi SDM untuk <i>updating</i> data riset guna mengakses dana-dana eksternal dan CSR
		3. Mendorong SDM untuk mengimplementasikan paten dan pendampingan implementasi UU tentang Desa
2.	Sarana Prasarana	1. Peningkatan mekanisme <i>resource sharing</i> dengan pihak eksternal maupun internal stakeholders (KPRI, BUA, BUNA, antar Pusat Studi dan Pusat Layanan)
		2. Peningkatan pendekatan program abdimas secara terintegrasi dengan pihak eksternal maupun internal stakeholders
		3. Peningkatan keterhandalan sarana prasarana laboratorium baik jenis peralatan maupun keragaman laboratoriumnya
		4. Peningkatan persyaratan sertifikasi untuk sarana prasarana laboratorium untuk jenis peralatan dan keragaman laboratoriumnya
3.	Organisasi dan Manajemen	1. Peningkatan dana untuk manajemen program dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan abdimas (Kemenristek dan ISO)
		2. Peningkatan <i>enforcement</i> dan <i>reward</i> oleh pihak manajemen bagi dosen/mahasiswa yang melakukan kegiatan abdimas
		3. Peningkatan status sistem manajemen yang tersertifikasi
4.	Jalinan Kerjasama	1. Peningkatan orientasi kerjasama yang bersifat integral dan berjangka panjang
		2. Mendorong peningkatan posisi tawar terhadap lembaga donor dan termasuk <i>legal aspectnya</i> , pada kegiatan bidang abdimas (utamanya pada pengabdian unggulan yang kompetitif) dan bidang kerjasama
5.	Letak dan Tata Kelola	1. Peningkatan kualitas luaran program abdimas
		2. Dilakukannya zonasi dan clustering abdimas bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat pada lokasi wilayah yang strategis dan terjangkau

6.	Sumberdaya Finansial	1. Peningkatan dana internal PNBPN sebagai dana pendampingan dengan tetap mengakses dana abdimas kompetitif nasional, CSR dan mitra lainnya
----	-----------------------------	---

Tabel 8
Formulasi Strategi Pengembangan LPM UB

<i>“Rapid Growth Strategy”</i>	Strategi Pengembangan	Unit Kerja	Jangka Waktu Implementasi			Instansi/pihak-pihak	
			1 th	3 th	5 th	Utama	Terkait
SDM	1. peningkatan kemampuan SDM melalui sertifikasi kompetensi keilmuannya	LPPM		v			v
	2. Peningkatan kemampuan keilmuan dan negosiasi bagi SDM untuk <i>updating</i> data riset guna mengakses dana-dana eksternal dan CSR	LPPM	v			v	
	3. Peningkatan implementasi paten dan pendampingan implementasi UU tentang Desa	LPPM		v			v
Sarana Prasarana	1. Peningkatan mekanisme <i>resource sharing</i> dengan pihak eksternal maupun internal stakeholders (KPRI, BUA, BUNA, antar Pusat Studi dan Pusat Layanan)	UB LPPM			v		v

	2. Peningkatan pendekatan program abdimas secara terintegrasi dengan pihak eksternal maupun internal stakeholders	LPPM BPPM		v			v
	3. Peningkatan keterhandalan sarana prasarana laboratorium baik jenis peralatan maupun keragaman laboratoriumnya	UB		v		v	
	4. Peningkatan persyaratan sertifikasi untuk sarana prasarana laboratorium untuk jenis peralatan dan keragaman laboratoriumnya	UB		v			v
Organisasi dan Manajemen	1. Peningkatan dana untuk manajemen program dalam mengimplementasikan kegiatan-kegiatan abdimas (Kemenristek dan ISO)	UB LPPM	v			v	
	2. Peningkatan <i>enforcement</i> dan <i>reward</i> oleh pihak manajemen bagi dosen/mahasiswa yang melakukan kegiatan abdimas	LPPM	v			v	
	3. Peningkatan status sistem manajemen yang tersertifikasi	LPPM		v			v

Jalanan Kerjasama	1. Peningkatan orientasi kerjasama yang bersifat integral dan berjangka panjang	LPPM UB		v			v
	2. Peningkatan posisi tawar terhadap lembaga donor dan termasuk <i>legal aspectnya</i> , pada kegiatan bidang abdimas (utamanya pada pengabdian unggulan yang kompetitif) dan bidang kerjasama	UB LPPM		v			v
Letak dan Tata Kelola	1. Peningkatan kualitas luaran program abdimas	LPPM BPPM	v			v	
	2. Pemberlakuan zonasi dan clustering abdimas bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat pada lokasi wilayah yang strategis dan terjangkau	FORUM LPPM PT	v				v
Sumberdaya Finansial	1. Peningkatan dana internal PNBPN sebagai dana pendampingan dengan tetap mengakses dana abdimas kompetitif nasional, CSR dan mitra lainnya	UB LPPM BPP	v			v	

IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

Dari analisis SWOT menunjukkan bahwa di bidang Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM UB memiliki kondisi yang baik untuk menggunakan kekuatan internalnya dan dipergunakan untuk memanfaatkan peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Dari analisis SWOT ini, maka strategi LPPM yang digunakan di bidang Pengabdian kepada Masyarakat adalah :

4.1. Rencana Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pemberdayaan Guru Besar dan Dosen sebagai pengembang kelompok pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pengembangan bertaraf internasional berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat di tingkat Universitas.
3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional dan internasional.
4. Meningkatkan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian.
5. Meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat.
6. Membuka peluang keterlibatan sumberdaya mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui skema Kuliah Kerja Nyata (KKN).
7. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pusat-pusat pelayanan dan BPPM di tingkat fakultas.
8. Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan hasil karya pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, artikel serta media publikasi lain.

4.2. Rencana Strategi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pemberdayaan Guru Besar dan Dosen senior sebagai pengembang kelompok pengabdian kepada masyarakat, melalui :

- 
- ✚ Pembentukan dan pendampingan dosen-dosen kelompok pengabdian di tingkat fakultas

2. Pengembangan pusat pelayanan bertaraf internasional berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat baik di tingkat Universitas maupun Fakultas, melalui :

- ✚ Pembentukan pusat pelayanan di tingkat universitas dengan koordinator LPPM dan kelompok-kelompok pengabdian di fakultas dengan koordinator BPPM

3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional dan internasional, melalui :

- ✚ Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan lembaga nasional dan internasional di bidang pengabdian kepada masyarakat.
- ✚ Pemantapan dan peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra kerjasama baik nasional maupun internasional.

4. Meningkatkan publikasi karya Pengabdian kepada Masyarakat

- ✚ Meningkatkan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian.
- ✚ Melaksanakan seminar desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- ✚ Melaksanakan penulisan jurnal, artikel serta media publikasi lain tentang hasil karya pengabdian kepada masyarakat.
- ✚ Pemberian penghargaan atau insentif bagi karya pengabdian yang sudah terimplemtasi di masyarakat
- ✚ Meningkatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat.

5. Meningkatkan relevansi pengabdian kepada masyarakat dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat, melalui :

- ✚ Meningkatkan dan memanfaatkan karya pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan bahan ajar berbentuk buku ajar.
- ✚ Memanfaatkan karya pengabdian kepada masyarakat untuk solusi permasalahan masyarakat.
- ✚ Peningkatan teknologi tepat guna, inovasi teknologi, modul, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial,
- ✚ Membentuk *Startup Company* (perusahaan rintisan), dari karya-karya pengabdian kepada masyarakat.

- 
- ✚ Meningkatkan dan memanfaatkan karya pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat berbentuk buku populer.

6. Merancang integrasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan skema KKN Tematik yang dikelola oleh LPPM dan Kegiatan PKM Mahasiswa

- ✚ Melaksanakan pilot kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh kelompok pengabdian yang melibatkan mahasiswa melalui skema KKN Tematik yang integratif.
- ✚ Mengintegrasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan kegiatan PKM Mahasiswa yang potensial.

7. Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan pusat-pusat pengabdian khususnya tingkat fakultas.

- ✚ Mengadakan pertemuan reguler antar LPPM dengan BPPM di tingkat fakultas.
- ✚ Melakukan koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan BPPM di tingkat fakultas.

8. Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian dan penulisan karya pengabdian kepada masyarakat.

- ✚ Workshop penyusunan dan pendampingan proposal pengabdian kepada masyarakat.
- ✚ Workshop model-model penulisan karya-karya pengabdian kepada masyarakat.

4.3. Program Pengabdian kepada Masyarakat

Program pengabdian kepada masyarakat yang akan dijalankan oleh LPPM adalah merujuk pada 6 (enam) payung unggulan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditujukan untuk memberikan koridor dan kejelasan arah serta kualitas dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen atau bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa di dalamnya. Adapun 6 (enam) payung pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi
2. Transfer dan Difusi teknologi
3. Inovasi IPTEKS dan Kelembagaan
4. Pengembangan Kearifan lokal

5. Pelayanan Sosial Dasar

6. Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan

Melalui 6 (enam) payung yang merupakan tema substansial dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat inilah nantinya dapat membantu memudahkan dosen di dalam menentukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan diajukan dan dijalaninya.

Selanjutnya, dari keenam payung ini digunakan untuk menjawab isu-isu permasalahan strategis dalam skala global, nasional dan kewilayahan melalui turunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dipaparkan di bawah ini.

4.4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Gambaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dijalankan oleh LPPM secara garis besar dirancang dengan skema alur berikut ini:



Skema alur di atas, dirancang untuk memastikan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat sinkron dengan isu-isu di tingkat global, nasional ataupun isu-isu kewilayahan. Demikian juga untuk mempertajam pijakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melandaskan pada identifikasi dan permasalahan prioritas yang telah terbagi ke dalam skala isunya.

Selanjutnya dari skema alur tersebut, penetapan-penetapan gambaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM dapat dilihat pada matrik di bawah ini.

PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT LPPM UB

ISU GLOBAL/ NASIONAL/ WILAYAH	ISU PRIORITAS	PERMASALAH AN PRIORITAS	SOLUSI PERMASALAH N PRIORITAS *)	PROGRAM DAN JENIS KEGIATAN	KEMITRAAN PT//UMKM/ CSR/ KBL/PEMDA/ Lain-lain	SUMBER DANA				
						PT	CSR	PEMDA	DIKTI	SUMBER LAIN
GLOBAL										
MEA	Persainagan Pasar Ekonomi	Lemahnya kapasitas Ekonomi Mikro/UMKM	Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi	1. Penguatan Kapasitas Ekonomi Mikro 2. Model dan Strategi Pengembangan Strategi Pasar	CSR Pemda UMKM	√	√	√	√	√
			Transfer dan Difusi teknologi	1. Optimalisasi penerapan TTG 2. Pengembangan dan diversifikasi Produk	CSR Pemda UMKM	√	√	√	√	√
SDG's	Kesehatan Ibu dan Anak	Angka Kematian Persalinan	Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi	1. Pelatihan Dukun dan Tenaga Kesehatan di fasilitas Kesehatan 1 2. Pemberdayaan Posyandu						
	Penyakit Endemik	Tingginya angka kejadian penyakit tropis	Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi	1. Edukasi masyakat, deteksi dini, promosi dan pengobatan pada masyarakat						
	Penyakit degeneratif	Tingginya morbiditas dan mortalitas	Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi	1. Edukasi masyakat, deteksi dini, promosi dan pengobatan pada masyarakat 2. Pemberdayaan Posyandu						
NASIONAL										
Ketahanan Pangan dan Energi	Keterbatasan sumber pangan dan energi	Ketergantungan pangan dan energi	Transfer dan Difusi teknologi	1. Pengembangan teknologi pertanian dan kelautan serta diversifikasi produk 2. Pengembangan model/inovasi trasfer teknologi dan memperkuat jaring komunikasi 3. Pengenalan dan penerapan teknolgi energi baru dan terbarukan untuk masyarakat	CSR Pemda UMKM PKBL	√	√	√	√	√

				berdasarkan potensi yang ada menuju masyarakat yang mandiri energy 4. Fasilitasi peninjauan kebijakan pertanian, perencanaan dan program terpadu dengan mempertimbangkan aspek multifungsi pertanian, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan; 5. Fasilitasi partisipasi masyarakat dan pemromosian pengembangan sumber daya manusia untuk pertanian berkelanjutan; 6. Fasilitasi peningkatan produksi pertanian dan sistem pertanian melalui diversifikasi pertanian dan kinerja non-pertanian dan pembangunan infrastruktur; 7. Pemberian sistem informasi perencanaan sumberdaya lahan dan pendampingan untuk pemanfaatannya dalam pelaksanaan pertanian berkelanjutan; 8. Pendampingan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya lahan 9. Pendampingan pemanfaatan sumberdaya air untuk produksi pangan yang berkelanjutan dan pembangunan pedesaan berkelanjutan; 10. Pendampingan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik tanaman untuk pangan dan pertanian berkelanjutan;						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				11. Pendampingan Konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya genetik ternak untuk pertanian berkelanjutan; 12. Sekolah lapangan untuk pengendalian hama dan penyakit terpadu 13. Pendampingan pengembangan tanaman gizi dan herbal Berkelanjutan untuk meningkatkan produksi pangan dan kesehatan masyarakat; 14. Pendampingan transisi energi Pedesaan untuk meningkatkan produktivitas;						
			Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi	1. Pembelajaran ekonomi alternatif 2. Pelatihan dan pendampingan masyarakat dalam memanfaatkan energi baru terbarukan untuk aktifitas ekonomi maupun pertanian dalam menunjang ketahanan pangan dan energy. 3. Pendampingan Pembentukan dan Pengembangan Jejaring Usaha Bersama Kelompok Pelaku Agrokompleks (UBKT) 4. Fasilitasi Pemetaan, Pengembangan dan penguatan Kelompok Pelaku Agrokompleks.: 5. Pendampingan implelementasi <i>Healthy Farm-Green Agriculture</i> : Produk Sehat dari Pelaku Agrokompleks	CSR Pemda UMKM PKBL	√	√	√	√	√
	Keberlanjutan dan perubahan iklim	Dengan meningkatnya pengetahuan	Mitigasi Bencana, Adaptasi	Perkotaan dengan fokus pada kota-kota utama:	CSR Pemda UMKM	√	√	√	√	√

		dan bukti pemanasan global, masyarakat menghadapi peningkatan tekanan untuk mengurangi dampak ekologi, meminimalkan limbah, dan rencana untuk beradaptasi, mitigasi dan ketangguhan terhadap perubahan iklim.	Perubahan Iklim dan Ketangguhan	1. Penegakkan peraturan perencanaan kota 2. Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan Rendah Emisi 3. Perencanaan untuk infrastruktur hijau dan logistik hijau bersama dengan pemetaan perkotaan dengan rencana manajemen energi yang tepat dan pengendalian banjir dan kekeringan 4. Penggunaan instrumen ekonomi untuk mengelola bangunan di kota 5. Penegakan peraturan untuk manajemen bencana dari komunitas masyarakat kota 6. Transfer kewenangan dalam pengelolaan bencana bagi pemerintah daerah 7. Peringatan bencana dini serta penganggaran dan masalah teknis Sektor pertanian dan pedesaan 1. Penilaian dampak dan risiko perubahan iklim di berbagai sektor pertanian 2. Penilaian peran pertanian dalam memproduksi makanan dan energi yang sesuai dengan pemanfaatan lahan yang tepat 3. Perancangan sistem kompensasi untuk pertanian konservasi untuk peningkatan layanan ekosistem 4. Promosi <i>green agriculture</i> dan pertanian organik 5. Pengenalan Investasi untuk infrastruktur hijau di sektor pertanian	PKBL						
--	--	---	--	---	------	--	--	--	--	--	--

				6. Efisiensi pemanfaatan air di sistem pertanian 7. Rencana Aksi pertanian sebagai tanggapan dampak perubahan iklim 8. Sekolah Lapangan untuk Adaptasi Perubahan Iklim 9. Perluasan sistem asuransi tanaman dan mengembangkan mekanisme pasar untuk manajemen risiko iklim 10. dengan partisipasi dari sektor swasta 11. Penerapan sistem pertanian lahan kering berkelanjutan 12. Penerapan sistem ketahanan pangan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rentan perubahan iklim 13. Pendampingan Evaluasi efek radiasi ultraviolet pada tanaman dan hewan yang disebabkan oleh penipisan lapisan ozon stratosfer. Ekosistem Daratan dan Hutan 1. Penilaian zona risiko bencana alam akibat perubahan iklim dan penerapan penggunaan lahan yang sesuai 2. Rehabilitasi ekosistem hutan 3. Pengenalan langkah-langkah insentif pajak untuk konservasi lahan dan hutan 4. Peningkatan penggunaan instrumen ekonomi untuk mendukung kegiatan konservasi 5. Pembuatan kegiatan percontohan untuk penerapan							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				hak-hak masyarakat atas penggunaan lahan 6. Peningkatan kesadaran hukum dan peraturan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam konservasi lahan 7. Sekolah lapangan masyarakat untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam dalam rangka adaptasi perubahan iklim Infrastruktur umum 1. Kegiatan penilaian risiko untuk setiap sistem infrastruktur 2. Penyusunan pedoman untuk penentuan dan perancangan yang mengarah ke pengurangan risiko perubahan iklim sejalan dengan rencana pengurangan gas rumah kaca 3. Promosi infrastruktur hijau 4. Pelaksanaan cost recovery untuk jalan dan infrastruktur lainnya untuk menjadi sumber dana dalam pembangunan transportasi umum 5. Pengembangan konservasi dan reboisasi di daerah aliran sungai untuk pengaturan debit sungai dan peningkatan kualitas air 6. Dukungan eco-desain dalam infrastruktur publik 7. Fasilitasi masyarakat untuk memiliki infrastruktur hijau yang mengarah ke pengurangan penggunaan mobil 8. Pengendalian limbah						
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Ekosistem air tawar daratan 1. Kegiatan penilaian risiko gangguan kuantitas dan kualitas air tawar 2. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya lahan dan air terpadu melalui partisipasi masyarakat lokal 3. Peningkatan skema nilai sumberdaya air 4. Peningkatan resapan air permukaan di lahan masyarakat 5. Pengembangan rencana konservasi dan tata kelola air tawar 6. Pendampingan pengelolaan air lokal 7. Pemantauan kualitas dan kuantitas air permukaan dan air bawah tanah Lahan basah (wetland) dan zona pesisir 1. Pengembangan rencana penggunaan lahan yang terintegrasi untuk wilayah pesisir 2. Penegakan hukum kawasan perikanan darat dan meningkatkan peran masyarakat dalam tugas-tugas perlindungan pantai 3. Peningkatan penegakan hukum dan peraturan untuk mendukung partisipasi masyarakat 4. Peningkatan kapasitas ekosistem pesisir untuk mempertahankan kapasitas yang ada dalam mendukung ketahanan pangan						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

				5. Fasilitasi rehabilitasi mangrove dan hutan pantai dengan partisipasi masyarakat 6. Peningkatan sistem pemantauan dan peringatan dini Kesehatan masyarakat: 1. Pendampingan penanganan kapasitas sektor kesehatan masyarakat untuk mengakomodasi risiko di masa depan 2. Penyebarluasan hasil penelitian tentang penyakit yang muncul dan vektor penyakit 3. Pendampingan masyarakat untuk lebih siap menghadapi penyakit saat terjadi bencana dan pasca bencana 4. Peningkatan efisiensi dan efektivitas untuk akses layanan kesehatan 5. Peningkatan kapasitas jaringan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan risiko kesehatan dari perubahan iklim 6. Peningkatan dan pengembangan sistem peringatan kesehatan lokal dan tanggap darurat						
Poros Maritim	Wilayah Pesisir dan Kepulauan	Kemiskinan dan kerentanan fisik dan sosial	Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan	1. Strategi Kemitigasian untuk mengatasi permasalahan wilayah pesisir dan kepulauan 2. Restorasi Lahan Basah 3. Sistem Pertanian Basah 4. Emetaan ancaman banjir dan sistem peringatan dini	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√

	Wilayah Urban dan Sub Urban	Kemiskinan dan kerentanan fisik dan sosial	Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan	1. Penerapan dan pendampingan teknologi dalam penataan kawasan dan upaya menanggulangi bencana akibat perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√
Daya Saing	Kualitas Produk dan Kelembagaan	Jaringan Kelembagaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi	1. Penguatan dan pengembangan ekonomi masyarakat 2. Model Pengembangan jaringan 3. Pengarusutamaan gender dalam pengembangan ekonomi	UMKM CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√
		Desiminasi Produk	Transfer dan Difusi teknologi	1. Peningkatan diversifikasi produk 2. Pengembangan jaringan komunikasi dalam struktur sosial masyarakat	UMKM CSR Pemda	√	√	√	√	√
		Kualitas Kelembagaan	Inovasi IPTEKS dan Kelembagaan	1. Pengembangan produk dan kelembagaan 2. Networking dan perluasan jangkaun pasar produk.	UMKM Pemda	√	√	√	√	√
	Isu Pendidikan berbasis ICT	Penguasaan IT yang masih rendah di masyarakat	Transfer dan Difusi teknologi	1. Pengembangan dan pemanfaatan media pendidikan masyarakat berbasis ICT	CSR Pemda UMKM	√	√	√	√	√
Reformasi Birokrasi	Good Governance	Praktik Good Governance blm optimal	Inovasi IPTEKS dan Kelembagaan	1. Strategi implemtasi Good Governance 2. Optimalisasi Pelayanan publik	Pemda	√	√	√	√	√
	Isu Korupsi, Kolusi, Nepotisme	Budaya KKN	Pengembangan Kearifan lokal	1. Strategi dan inovasi pemberantasan KKN bersifat kelokalan	Pemda	√	√	√	√	√
Membangun Negara dari Pinggiran	Tata Kelola Pemerintahan Desa	Blm optimal implementasi UU Desa	Pelayanan Sosial Dasar	Strategi implemtasi UU Desa Pemberdayaan bidang layanan sosial dasar	Pemda	√	√	√	√	√

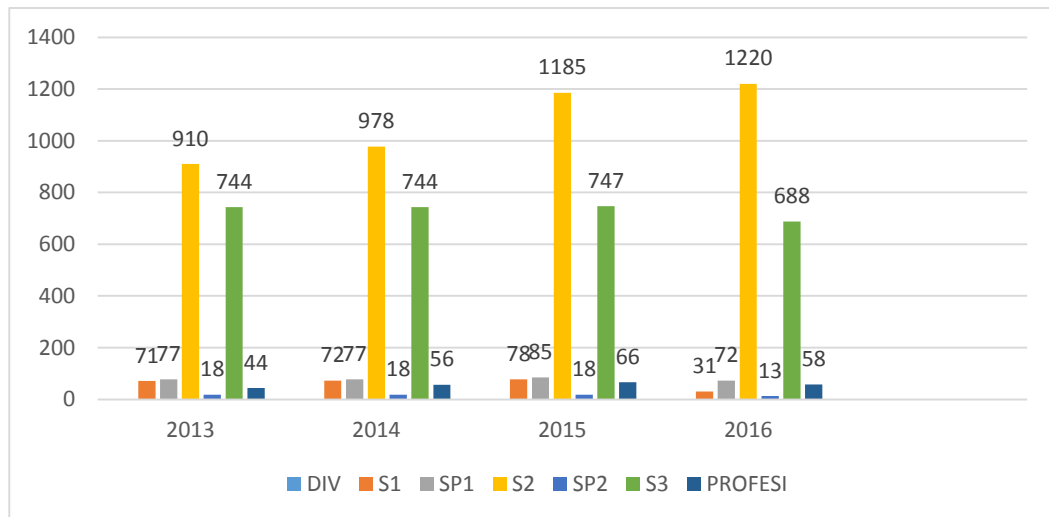
	Pemberdayaan Masyarakat	Blm optimal fungsi Desa sebagai Agen Pemberdayaan	Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi	Optimal fungsi Desa sebagai Agen Pemberdayaan Penguatan kapasitas pemerintahan desa	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√
Revolusi Karakter Bangsa	Identitas Kebangsaan	Marginalisasi Budaya	Pengembangan Kearifan lokal	Penguatan Ruang Budaya Budaya sebagai Media Pendidikan Pendidikan kebangsaan	Pemda CSR PKBL	√	√	√	√	√
WILAYAH										
Daya Saing Sektoral	Standarisasi Produk	Permasalahan standar produk	Inovasi IPTEKS dan Kelembagaan	Peningkatan standarisasi kualitas produk	Pemda CSR	√	√	√	√	√
Infrastruktur Ekonomi	Pengembangan wilayah lintas Selatan	Daya dukung jaringan dan akses	Transfer dan Difusi teknologi	Strategi pengembangan wilayah pesisir Optimalisasi potensi wilayah pesisir selatan	Pemda CSR	√	√	√	√	√
PERGURUAN TINGGI										
Kewirausahaan sosial / Social Entrepreneurship	Hilirisasi Produk Pengetahuan berbasis riset	Lemahnya implementasi produk pengetahuan berbasis riset	Transfer dan Difusi teknologi	Strategi Desiminasi dan implemtasi produk pengetahuan Optimalisasi produk lokal	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√
	Penguatan Kapasitas Masyarakat	Lemahnya kapasitas masyarakat dlm kewirausahaan sosial	Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi	1. Mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan sosial 2. Pengutan modal sosial masyarakat	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√
	Pemanfaatan teknologi dan pengetahuan	Lemahnya pemanfaatan teknologi dan pengetahuan	Inovasi IPTEKS dan Kelembagaan	1. Penguatan pemanfaatan lpteks bagi masyarakat 2. Mobilisasi mandiri kelembagaan mikro	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√
	Penguatan sosial Budaya	Memudarnya kearifan lokal	Pengembangan Kearifan lokal	1. Optimalisasi nilai dan produk budaya 2. Pengenalan kembali aset budaya bangsa	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√

				3. Pengembangan ekowisata bagi daerah-daerah potensial						
	Agenda Pelayanan Sosial Dasar	Belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar	Pelayanan Sosial Dasar	1. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, lingkungan dan adat budaya 2. Pengembangan dan pemanfaatan media pendidikan dan pembelajaran berbasis IT	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√
	Mitigasi bencana dan ketangguhan masyarakat	Kerentanan Fisik dan sosial kemasyarakatan	Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan	1. Peta permasalahan dan strategi kemitigasian 2. Partisipasi dan ketangguhan sosial kemasyarakatan 3. Edukasi tangguh bencana	CSR Pemda PKBL	√	√	√	√	√

4.5. Kompetensi Pelaksana Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

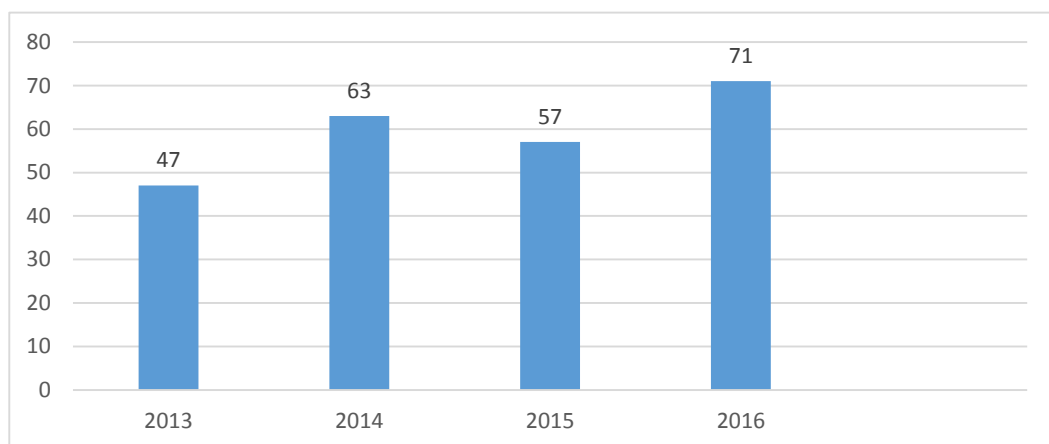
Pelaksana dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Brawijaya (UB) dapat dilihat dari data-data dosen sebagai unsur utama pelaksana kegiatan ini. Adapun unsur kompetensi bisa terlihat dari beberapa data dosen terkait aspek berikut ini.

Data Dosen Berdasarkan Jenjang Pendidikan



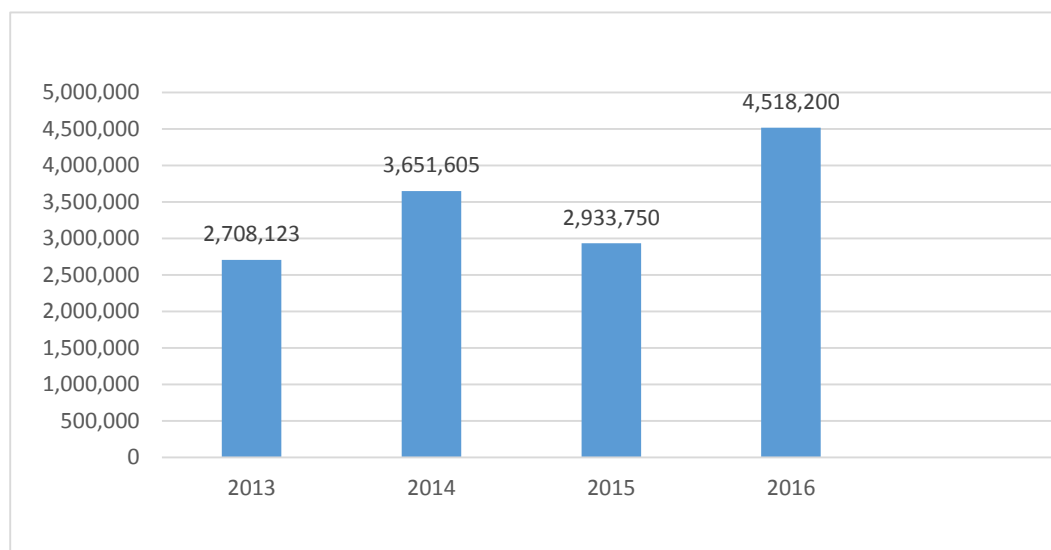
Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2 mengalami peningkatan selama kurun waktu 4 tahun, namun dosen dengan kualifikasi S3 mengalami sedikit penurunan. Dengan naiknya jumlah dosen secara keseluruhan ini juga signifikan menambah jumlah kegiatan pengabdian masyarakat yang diusulkan dan didanai.

Jumlah Dosen Penerima Hibah Pengabdian kepada Masyarakat



Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah dosen yang mengusulkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dosen yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun ke tahun menunjukkan indikator positif.

**Jumlah Dana Hibah Pengabdian kepada Masyarakat
Dalam Juta *)**



Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terserap oleh dosen-dosen dalam kurun waktu 4 tahun terakhir mengalami peningkatan. Meskipun pada tahun 2015 sempat mengalami penurunan, namun di tahun 2016 kondisi ini kembali membaik semakin melesat sehingga dari sini dapat menunjukkan tingginya serapan dana pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dosen yang mampu menyerap dana-dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun ke tahun menunjukkan indikator positif.

4.6. Indikator Kinerja Pengabdian kepada Masyarakat

Guna memastikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dijalankan oleh dosen-dosen di lingkungan UB terstandarisasi dengan baik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kemenristekdikti, maka LPPM UB menetapkan 8 indikator kinerja yang merujuk pada indikator KPI (*Key Performance Indicator*) sebagai berikut:



4.6.1. Standar Hasil

1. Definisi Standar Hasil

Yang dimaksudkan dengan hasil pengabdian kepada masyarakat adalah gambaran penerapan bidang ilmu yang ada di UB, kompetensi dan keahlian dosen-dosen pelaksana kegiatan dan hasil-hasil ipteks yang diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat

2. Pernyataan Standar Hasil

- a. Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terimplemtasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil pengabdian selain memenuhi ketentuan (a), harus mengarah serta memenuhi ketentuan dan peraturan dari LPPM UB.
- c. LPPM UB mendorong hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat terpublikasi secara luas.

3. Strategi Pencapaian Standar Hasil

LPPM UB merancang pelatihan-pelatihan penulisan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.

4. Indikator Capaian Standar Hasil

Adanya dokumen hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan penerapan ipteks yang tercantum jelas pada rencana usulan dan dokumen laporan capaian yang ditetapkan oleh LPPM UB.

4.6.2. Standar Isi

1. Definisi Standar Isi

Yang dimaksudkan dengan standar isi pengabdian kepada masyarakat adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan produk ipteks yang diimplementasikan di masyarakat.

2. Pernyataan Standar Isi

- a. Materi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada luaran berupa produk ipteks atau model-model yang diterapkan untuk mengantisipasi ataupun menyelesaikan masalah atau meningkatkan suatu potensi yang ada di masyarakat.

- 
- b. Materi pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat diupayakan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan/atau industri serta kelembagaan.
 - c. Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan pembacaan atas kebutuhan masyarakat di masa mendatang.
3. Strategi Pencapaian Standar Isi
- LPPM UB merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan UB.
4. Indikator Capaian Standar Isi
- Adanya dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menerangkan dengan jelas rangkaian kegiatan atas ipteks yang diimplementasikan di masyarakat dan ukuran capaian yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4.6.3. Standar Proses

1. Definisi Standar Proses
- Yang dimaksudkan dengan standar proses adalah kriteria minimal tentang proses dijalankannya rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu atau ipteks dari dosen-dosen pelaksana kegiatan di wilayah sasaran kegiatan.
2. Pernyataan Standar Proses
- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dijalankan dengan rangkaian proses yang baik sebagaimana ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM UB.
 - b. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan baik bagi dosen pelaksana dan masyarakat sasaran.
 - c. Proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melalui standar prosedur pengajuan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang ditetapkan oleh LPPM UB.



3. Strategi Pencapaian Standar Proses

- a. LPPM UB merancang pelatihan penyusunan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen di lingkungan UB.
- b. LPPM UB memberdayakan sistem prosedural yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanisme yang diatur dan dikoordinasikan dengan LPPM UB.

4. Indikator Capaian Standar Proses

Adanya dokumen laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang menerangkan dengan jelas rangkaian dan proses kegiatan atas ipteks dalam bentuk skema-skema kerja yang diimplementasikan di masyarakat.

4.6.4. Standar Penilaian

1. Definisi Standar Penilaian

Yang dimaksudkan dengan standar penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah mekanisme penilaian yang digunakan dalam mendukung evaluasi proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pernyataan Standar Penilaian

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan instrumen penilaian usulan proposal dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan reviewer yang memiliki kompetensi di bidang pengabdian kepada masyarakat pada skala universitas dan nasional.
- b. Penilaian usulan proposal dan hasil pengabdian kepada masyarakat mengacu pada format dan panduan LPPM UB dan Kemenristekdikti.
- c. Penilaian usulan proposal dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.

3. Strategi Pencapaian Standar Penilaian

- a. LPPM UB merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen-dosen di lingkungan UB terkait dengan tuntutan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipersyaratkan oleh LPPM UB dan Kemenristekdikti.

- 
- b. LPPM UB memberdayakan kompetensi dosen-dosen yang memiliki *track-record* yang baik di bidang pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung mekanisme penilaian usulan proposal dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diatur oleh LPPM UB.
 4. Indikator Capaian Standar Penilaian

Adanya dokumen atau instrumen baku yang digunakan sebagai pijakan penilaian usulan dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang merujuk pada standar LPPM UB dan Kemenristekdikti.

4.6.5. Standar Pelaksanaan

1. Definisi Standar Pelaksanaan

Yang dimaksudkan dengan standar pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan track record dosen pelaksana, penguasaan metodologi dan penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan yang ada di tingkat sasaran kegiatan.
2. Pernyataan Standar Pelaksanaan
 - a. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan pada kualifikasi akademik pelaksana yang bisa multi-disipliner.
 - b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
 - c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman atas sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat kelompok sasaran.
3. Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan
 - a. LPPM UB merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen- dosen di lingkungan UB.
 - b. LPPM UB memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.



4. Indikator Capaian Standar Pelaksanaan

- a. Minimal terdapat jumlah usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat 10% dari jumlah keseluruhan dosen setiap tahun.
- b. Pengajuan usulan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh para dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya dan atau bidang multi-disipliner.
- c. Dosen pelaksana kegiatan memiliki kedalaman sasaran kegiatan, hingga dapat menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kelompok sasaran.

4.6.6. Standar Sarana dan Prasana

1. Definisi Sarana dan prasarana

Yang dimaksudkan dengan standar sarana dan prasana adalah kriteria minimal tentang fasilitas LPPM UB yang digunakan dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terkait dengan penerapan bidang ilmu dari beragam program studi yang ada di UB dan di wilayah sasaran kegiatan

2. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengabdian yang dimiliki oleh LPPM UB untuk kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana yang digunakan di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan baik bagi dosen pelaksana maupun masyarakat kelompok sasaran.
- c. Penggunaan sarana dan prasarana LPPM UB oleh dosen pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus melalui standar prosedur penggunaan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh UB.

3. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana

LPPM UB menmdayagunakan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mekanismenya diatur melalui prosedur yang telah ditetap oleh LPPM.

4. Indikator Capaian Standar Sarana dan Prasarana

Adanya dokumen tentang penggunaan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum pada rencana penggunaan sarana prasarana LPPM UB

4.6.7. Standar Pengelolaan

1. Definisi Pengelolaan

Yang dimaksudkan dengan standar pengelolaan adalah kriteria minimal untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pernyataan Standar Pengelolaan

LPPM UB membentuk unit untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat, yang memiliki fungsi:

- a. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

3. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan

- a. LPPM UB mengundang narasumber dari pusat dalam seminar dan workshop pengelolaan bidang pengabdian kepada masyarakat.
- b. Setiap tahun pimpinan LPPM UB menilai kinerja unit Pengabdian kepada Masyarakat.



4. Indikator Capaian Standar Pengelolaan

- a. Adanyanya laporan kinerja Unit Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
- b. Terdaftarnya laporan kinerja tiap tahun dan fungsi unit pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data LPPM UB.

4.6.8. Standar Pembiayaan dan Pendanaan

1. Definisi Pembiayaan dan Pendanaan

Yang dimaksudkan dengan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pernyataan Standar Pembiayaan dan Pendanaan

- a. Universitas Brawijaya (UB) menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi:
 - Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta
 - Peningkatan kapasitas pelaksana
- b. Universitas Brawijaya (UB) menyediakan dana internal untuk membiayai dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pembiayaan yang dimaksudkan meliputi:
 - Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- c. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan Universitas Brawijaya (UB).



3. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan

- a. Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian
- b. Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap pertama diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan setelah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan kepada LPPM UB.
- c. Pelaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan memasukkannya kepada Unit Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Indikator Capaian Standar Pembiayaan dan Pendanaan

- a. Dana internal yang disediakan oleh universitas dapat diserap oleh sejumlah usulan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen dilingkungan Universitas Brawijaya (UB).
- b. Usulan proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos seleksi memuat rincian pembiayaan sesuai standar pelaporan.
- c. Laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimasukkan tepat waktu sesuai dengan kontrak.

5.1 Sumber Dana

Sumber dana didasarkan pada rencana program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2016 oleh masing-masing fakultas yang sumber dananya berasal dari, LIPI, Kementerian RISTEKDIKTI, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perikanan dan Ilmu kelautan, Kementerian Kehutanan, Perum Perhutani, Pemda dan dari instansi pemerintah yang lain maupun dari instansi swasta seperti industri pengembangan.

5.2 Perkiraan Dana Selama 5 Tahun Pertama

Berdasarkan hasil perhitungan detail masing-masing jenis program pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, maka selama lima tahun pertama diperkirakan membutuhkan dana paling sedikit Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Hal ini didasarkan atas daftar rincian dana yang dibutuhkan dari masing-masing program pengabdian kepada masyarakat tahun 2016.

5.2.1 Rencana Implementasi

Rencana/Program	Kegiatan	Target/Tahun										Dampak Terhadap Kemitraan
		2016		2017		2018		2019		2020		
Pemberdayaan Guru Besar dan Dosen sebagai pengembang kelompok pengabdian kepada masyarakat	Pembentukan dan pendampingan oleh setiap profesor/dosen senior ditingkat fakultas pada kelompok pengabdian kepada masyarakat	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Pengoptimalan proses pengabdian masyarakat baik dari segi teori maupun teknis
		71	4,5M	100	7M	130	9M	150	11M	170	13M	
Mengembangkan pusat-pusat pelayanan pengembangan bertaraf nasional dan internasional berbasis kearifan lokal yang mampu memenuhi dan memberikan solusi masalah yang dibutuhkan masyarakat baik di tingkat Universitas maupun Fakultas.	Pembentukan pusat pelayanan pengembangan ditingkat universitas dan fakultas dengan koordinator LPPM	5		8		10		11		12		Kemudahan pada masing-masing fakultas terkait aksesibilitas program rencana pengabdian kepada masyarakat terutama kegiatan yang berorientasi pada solusi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat
Meningkatkan jumlah publikasi hasil karya pengabdian kepada masyarakat	- Pemetaan karya pengabdian kepada masyarakat yang layak dipublikasikan - Pengusulan pemberian dana untuk proses penulisan karya pemberdayaan kepada masyarakat - Meningkatkan publikasi karya pengabdian kepada masyarakat baik skala nasional dan internasional	24		50		78		100		125		Efisiensi rencana program pengabdian kepada masyarakat terkait sumber dana dan referensi baik bagi masyarakat secara langsung, kemitraan maupun pelaksana di tingkat nasioanl dan internasional

Rencana/Program	Kegiatan	Target/Tahun										Dampak Terhadap Kemitraan
		2016		2017		2018		2019		2020		
Meningkatkan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional dan internasional.	- Pemantapan dan peningkatan jejaring dengan lembaga nasional maupun internasional dibidang pengabdian kepada masyarakat. - Pemantapan dan peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra kerjasama baik nasional maupun internasional.	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Jml. Kegiatan	Dana Kegiatan	Memperluas jaringan nasional dan internasional untuk optimalisasi program pengabdian kepada masyarakat baik dari segi pencarian dana maupun publikasi hasil riset untuk program pengabdian kepada masyarakat
		98	29M	110	30M	120	37M	130	40M	140	50M	
Meningkatkan budaya kompetensi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil penelitian dan penulisan jurnal ilmiah.	- Melaksanakan seminar ilmiah internasional karya pengabdian kepada masyarakat. - Meningkatkan dana hibah pengabdian kepada masyarakat.	25		35		45		55		70		Memajukan kondisi wilayah tertentu dimana sangat membutuhkan penelitian dan tindak lanjut berbentuk pengabdian kepada masyarakat terkait potensi atau masalah yang terjadi pada wilayah eksiting
Meningkatkan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran dan kebutuhan masyarakat.	- Memanfaatkan karya pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan bahan ajar. - Memanfaatkan karya pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan memberi solusi permasalahan masyarakat. - Peningkatan buku ajar dan buku modul	8		15		25		35		402		Meningkatkan potensi dan memperoleh solusi masalah yang terjadi wilayah eksisting dengan adanya kemajuan hasil riset serta peningkatan teknologi tepat guna dan rekayasa sosial yang dapat diimplementasikan di masyarakat

Rencana/Program	Kegiatan	Target/Tahun					Dampak Terhadap Kemitraan
		2016	2017	2018	2019	2020	
	- Peningkatan teknologi tepat guna, inovasi teknologi, modul, prototipe, desain, karya seni, rekayasa sosial, - Membentuk Startup Company (perusahaan rintisan), dari hasil-karya pengabdian kepada masyarakat. - Memfaatkan karya pengabdian kepada masyarakat berupa buku populer untuk kepentingan publikasi masyarakat luas.						
Revitalisasi peran koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dengan pusat-pusat layanan serta kelompok-kelompok pengabdian di tingkat fakultas melalui BPPM	- Mengadakan pertemuan reguler antar LPPM dengan BPPM sebulan sekali. - Melakukan koordinasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan BPPM fakultas	2	5	10	12	15	Intergrasi antara LPPM dan BPPM semakin mengefisiensi kinerja dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Meningkatkan kapasitas dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penulisan karya-karya pengabdian.	- Workshop pengabdian kepada masyarakat bagi dosen. - Workshop penulisan karya pengabdian dalam bentuk buku modul dan buku populer.	71	100	125	150	175	Meningkatkan jumlah publikasi karya pengabdian kepada masyarakat yang dapat dimanfaatkan bagi pembelajaran mahasiswa dan bagi masyarakat luas.

5.2.2 Indikator Kinerja Pengabdian Kepada Masyarakat

Sumber Dana		Base Line 2016		Base Line 2017		Base Line 2018		Base Line 2019		Base Line 2020	
		Jumlah Kegiatan	Dana Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Dana Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Dana Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Dana Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Dana Kegiatan
DIKTI	IbM	55	2,313,200,000	60	2M	30	1.5M	30	1.5M	30	1.5M
	IbW	1	100,000,000	5	0.5M	10	1M	10	1.5M	10	1.5M
	IbiKK	9	1,395,000,000	10	1.5M	10	2M	15	3M	20	4M
	Hi Link	1	250,000,000	4	1M	5	1M	5	1.5M	5	1.5M
	IbDM			10	1.5M	10	1.5M	10	1.5	15	2M
	IbBUD			5	0.5M	10	1M	10	1M	10	1.5M
	IbPE	3	285,000,000	5	0.5M	5	0.5M	5	0.5M	5	0.5M
	IPTEKDA	2	175,000,000	5	0.5M	5	0.5M	5	0.5M	5	0.5M
		71	4,5M	100	7M	130	9M	150	11M	170	14M
		114	27M	120	29M	125M	32M	135	40M	150	50M

29M

5.2.3 Indikator Kerjasama

Sumber Lain	PNBP/APBD	2	1,454,000,000	5	1.5M	5	1.5M	10	1.5M	15	4M
	CSR			5	1M	5	1M	5	2M	5	5M
	Kerjasama/AP BD	96	28,151,790,070	100	29M	110	29M	115	35M	120	40M
	Pemda/ APBD										
Mitra Binaan	PKBL Danareksa	16	380,000,000	25	0.5M	30	0.5M	35	0.5M	40	1M



5.3 Pola Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat LPPM-UB

5.3.1 Pola Pemantauan dan Evaluasi

1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi Renstra PPM UB. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra PPM UB dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan melalui kegiatan dan/atau program PPM UB.

2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut (a) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi; (b) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (c) dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi; (d) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; (e) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (f) mencakup seluruh program kegiatan yang bersifat komprehensif; (g) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; (h) berbasis indikator kinerja; dan (i) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut

- (1) Penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing;
- (2) Pemerataan dan perluasan akses program;
- (3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan oleh unit-unit program studi, fakultas, Pusat-pusat studi dan lembaga-lembaga lain di lingkungan UB.

3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PPM UB meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program kegiatan pengabdian masyarakat, (b) evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengabdian, (c) evaluasi kinerja program kegiatan Pengabdian masyarakat PPM UB.

4. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara menyeluruh dan terencana sesuai program kerja yang telah ditetapkan dalam renstra PPM UB.

a. Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Universitas.

Pemantauan dan evaluasi di tingkat tersebut digunakan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target implementasi program PPM UB secara menyeluruh; (b) memperbaiki kinerja unit pengelola program (PPM UB); (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan unit pengelola program dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

b. Pemantauan dan Evaluasi di tingkat Fakultas

Pemantauan dan evaluasi di tingkat tersebut bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian target implementasi program di tingkat Fakultas; (b) memperbaiki kinerja pengelolaan program di tingkat fakultas; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan unit pengelola di tingkat fakultas dalam melaksanakan tugas pemantauan dan evaluasi.

c. Pemantauan dan Evaluasi di tingkat pusat studi dan unit penjaminan mutu.

Pemantauan yang dilakukan di tingkat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program PPM sesuai kompetensi di unit tersebut. Sementara itu, pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu adalah untuk mendapatkan pemetaan capaian standar kinerja yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kinerja lembaga terkait yaitu PPM UB.

VI PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Program Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Malang Alhamdulillah telah selesai disusun. Penyusunan dokumen ini sangat penting untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi civitas akademika Universitas Brawijaya Malang dalam merencanakan, mengelola dan mengimplementasikan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Brawijaya Malang. Harapannya bahwa dengan adanya renstra PPM ini bisa sebagai media untuk memacu dan mendorong kegiatan-kegiatan akademik bagi segenap civitas akademika khususnya program pengabdian kepada masyarakat agar terjadi peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya. Untuk menjaga keberlanjutan mutu kegiatan PPM maka monitoring dan evaluasi akan tetap dilakukan agar senantiasa terjaga kualitasnya dalam mengimplementasikan pelaksanaan program. Namun demikian bilamana diperlukan penyesuaian-penyesuaian maka dokumen tersebut akan segera dievaluasi dan disempurnakan kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mutakhir. Tak lupa kami ucapkan terimakasih kepada tim penyusun renstra PPM UB semoga sumbangan pemikiran dan tenaganya dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

I.	Sejarah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPPM-UB)	I-1
I.1	Sejarah Lembaga Penelitian Universitas Brawijaya (LEMLIT-UNBRA) berdiri sejak Tahun 1978 sampai dengan 2008	I-1
I.2	Sejarah Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (LPM - UNBRAW) berdiri sejak Tahun 1973 sampai dengan 2008	I-4
I.3	Sejarah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) berdiri sejak Tahun 2008 sampai dengan Sekarang	I-5

BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT

2.1	Visi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat – LPPM UB	II-1
2.2	Misi Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat – LPPM UB	II-1
2.3	Tujuan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat – LPPM UB	II-1
2.4	Analisis Kondisi Saat Ini	II-2
2.4.1	Riwayat perkembangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	II-2
2.4.2	Capaian kinerja	II-3
2.4.3	Peran Unit Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	II-4
2.4.4	Potensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	II-4
2.5	SWOT Analysis	II-6

BAB III GARIS BESAR RENSTRA-PPM PT

3.1	Tujuan dan Sasaran Pelaksanaan	III-1
3.1.1	Tujuan	III-1
3.1.2	Sasaran	III-1
3.2	Strategi dan Kebijakan Unit Kerja	III-1
3.2.1	Strategi Pengembangan Unit Kerja LPPM/LPM/P3M PT	III-1
3.2.2	Formulasi Strategi Pengembangan	III-2

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA

2.1	Rencana Program Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat	IV-1
2.2	Relevansi KKN Tematik dengan Kegiatan Pengabdian Dosen	IV-1

BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI

5.1	Sumber Dana	V-1
5.2	Perkiraan Dana Selama 5 Tahun Pertama	V-1
5.3	Pola Pemantauan Dan Evaluasi Implementasi RENSTRA Pengabdian kepada Masyarakat LPPM-UB	V-9
5.3.1	Pola Pemantauan	V-9
5.3.2	Rencana Implementasi	V-10

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	SWOT Lembaga Pengabdian Masyarakat.....	II-7
Tabel 2. 2	SWOT Sumber Daya Manusia (SDM)	II-9
Tabel 2. 3	SWOT Sarana Prasarana.....	II-9
Tabel 2. 4	SWOT Organisasi dan Manajemen	II-10
Tabel 2. 5	SWOT Jalinan Kerjasama	II-11
Tabel 2. 6	SWOT Letak dan Tata Kelola	II-11
Tabel 2. 7	SWOT Sumberdaya Finansial	II-12
Tabel 2. 8	Formulasi Strategi Pengembangan LPM UB	II-13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Skema Pengembangan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat LPPM-UB	I-21
-------------	--	------

